ISSN: 1410-3877

Buletin Haba

Budaya dan Politik

Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh

2014 70

Haba

Informasi Kesejarahan dan Kenilaitradisionalan

No. 70 Th. XIV
Edisi Januari – Maret 2014

PELINDUNG
Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PENANGGUNG JAWAB
Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh

DEWAN REDAKSI
Rusjdi Ali Muhammad
Rusdi Sufi
Aslam Nur

REDAKTUR PELAKSANA
Cut Zahrina
Agung Suryo Setyantoro
Fariani
Nasrul Hamdani

SEKRETARIAT
Kasubag Tata Usaha
Bendaharawan
Yulhanis
Razali
Ratih Ramadhani
Santi Shartika

ALAMAT REDAKSI
Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Telp. (0651) 23226-24216 Fax. (0651)23226
Email : bpnbbandaaceh *a* yahoo.com

Diterbitkan oleh :
Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan misi Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh dari pembaca 7-10 halaman diketik 2 spasi, Times New Roman 12, ukuran kwarto. Redaksi dapat juga menyingkat dan memeriksa tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Bagi yang dimuat akan menerima imbalan sepantasnya.

ISSN : 1410 – 3877
STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Info Budaya

Dari Cina ke Tionghoa (Lagi)

Wacana

Hasbullah — **Sejarah Konflik, Budaya Poltik dan Ketegangan di Aceh Menjelang Pemilu 2014**

Nurmila Khaira — **Pemilu Di Aceh: Belajar Dari Institusi Politik Lokal**

Cut Zahrina — **Pesta Demokrasi Masyarakat Aceh: Memilih Pemimpin Berdasarkan Kualitas dan Popularitas**

Agung Suryo Setyantoro — **Orientasi Politik *Ureung Aceh* Dari Masa ke Masa**

Agus Budi Wibowo — **Kebiasaan Minum Kopi di Warung Kopi/Cafee: Diskusi Budaya dan Politik Aceh**

Teguh Santoso — **Hegemoni Bahasa Dalam Dunia Politik**

Sudirman — **Kepemimpinan Dalam Masyarakat Aceh**

Muhajir Al Fairuzy — **"Intuisi Tak Terbatas" (Memotret Budaya Protes Facebook Dalam Dinamika Politik Aceh)**

Cerita Rakyat

Asal Mula Paya Dapur

Pustaka

Nasionalisme Dalam Pikiran Orang Medan

Cover

Harmonisasi

Tema Haba No. 71 — **Keanekaragaman Kesenian Tradisional**

89

PENGANTAR

Redaksi

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Mengawali tahun 2014 ini Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh kembali menerbitkan Buletin Haba No 70 tahun 2014 dengan tema Budaya dan Politik di Aceh dan Sumatera Utara. Kajian ini akan menampilkan berbagai peristiwa politik dan budaya yang terjadi di dua provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Utara, tentunya dalam memeriahkan tahun demokrasi atau pemilihan umum yang sedang berlangsung di Indonesia.

Adapun artikel yang dimuat dalam Buletin Haba kali ini berkaitan dengan kesinambungan budaya masyarakat dalam memahami pentingnya politik untuk membina keharmonisan bangsa dan negara. Harapan ke depan sistem politik yang berkembang akan selalu berpedoman pada budaya masyarakat yang mendambakan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupannya. Sehingga terciptanya perjalanan politik pemerintahan seperti harapan semua masyarakat. Hal tersebut seperti yang terdapat dalam wacana yang membahas kepemimpinan dalam masyarakat Aceh dan membahas seputar sejarah, budaya serta politik yang berkembang dalam masyarakat Aceh.

Akhir kata, redaksi mengharapkan artikel-artikel yang tersaji dalam Buletin Haba ini dapat dijadikan referensi dan bacaan dalam menggali pengetahuan kelokalan baik di Provinsi Aceh maupun Sumatera Utara. Kajian sejarah dan budaya yang dimuat di dalamnya menjadi sebuah gambaran kondisi masyarakat mulai dari masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Kepada para editor dan penulis kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaan buletin ini.

Redaksi

DARI CINA KE TIONGHOA (LAGI)

Tanggal 14 Maret 2014 jadi hari bersejarah bagi warga Tionghoa yang disebut Cina (secara formal) sejak 1967. Hari itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keputusan Presiden No. 12/2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Isi pokok surat edaran itu ialah mengganti istilah Tionghoa atau kadang ditulis juga dengan Tionghua dengan istilah Tjina (Cina) dan sebutan resmi untuk Republik Rakjat Tiongkok (RRT) menjadi Republik Rakyat China (RRC) atau sering disebut China saja.

Keputusan di masa akhir jabatan Presiden Yudhoyono disambut hangat warga Tionghoa di Indonesia. Kabarnya, lafal Cina terdengar tidak enak di telinga kebanyakan warga Tionghoa yang jumlahnya mencapai antara lima sampai enam persen dari jumlah penduduk Indonesia. Selain tidak enak didengar, cara melafalkan 'Cina' oleh orang bukan-Cina terasa menyakitkan hati. Istilah Cina ini juga mengandung prasangka karena 'dibentuk' dan dikuatkuasakan secara politik untuk membedakan warga pribumi Indonesia dengan kelompok migran asal Tiongkok ini.

Terlepas dari mengapa istilah Cina itu terdengar tidak enak di telinga warga Tionghoa Indonesia, istilah Cina maupunTionghoa punya akar sejarah yang panjang. China (dengan 'h') telah dikenal secara internasional untuk menyebut People Republic of China (RRC) dan Republic of China (Taiwan). Secara historis, istilah ini juga telah dikenal di India sejak 1.400 sebelum Masehi. Konon, kitab Mahabaratha mengartikan Cina sebagai daerah yang jauh. Orang Arab pun demikian, negeri yang menjadi salah satu lintasan jalur sutera itu disebut *Shinn.* Istilah ini bahkan 'diabadikan' dalam hadits *utlub-ul-ilm-i wa-lau pi-shinn* yang berarti tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Penjelajah lautan dari Eropa abad ke-15 yang mencari rempah-rempah ke dunia Timur juga menyebutkan demikian.

Istilah *Cina* atau *Chin* merujuk pada orang atau penduduk yang tinggal di dataran Tiongkok yang luas itu. Secara harfiah, istilah Cina ini menunjuk pada kelompok-kelompok etnik di dataran Tiongkok yang menjadi kawula Dinasti Chin; dinasti yang berhasil mempersatukan negeri-negeri di dataran Tiongkok yang masyarakatnya majemuk itu. Keberhasilan ini Kaisar dari dinasti ini kemungkinan besar menjadi dasar penyebutan kawula penguasa negeri itu sebagai Chin atau orang-orang (dari) Chin oleh orang Arab dan Eropa yang kemudian membawa istilah itu ke negeri jajahan mereka di Asia.

Istilah Tionghoa juga punya alur ceritanya sendiri. Istilah yang lebih disenangi orang Tionghoa terutama warga seniornya ini dilembagakan secara politik ketika kekaisaran Tiongkok yang dipimpin Henry Pu Yi jatuh. Dr. Sun Yat Sen yang dikenal sebagai tokoh Revolusi Tiongkok membentuk negara baru yang bernama *Tionghwa Minkwo* yang diterjemahkan sebagai Republik China. Perseteruan antara Kuomintang (nasionalis) dan Kunchangtang (komunis) yang mengakibatkan perpecahan Tiongkok sejak 1948 tidak mempengaruhi penamaan itu. Negara di daratan besar Tiongkok yang berhasil dikuasai komunis bersalin nama menjadi *Tionghwa Minkwo Zengmin* yang berarti Republik Rakyat Cina.

Di Indonesia sejak masa kolonial, istilah Cina dan Tionghoa digunakan secara bersamaan. Bedanya hanya pada penggunaan saja. Istilah Cina cenderung digunakan oleh pemerintah kolonial sebagai 'nama resmi' dalam urusan administrasi seperti halnya Inggris di

Semenanjung Melayu. Cina juga cenderung digunakan oleh warga pribumi Hindia Belanda (*Inhemse*) untuk menyebut orang Tionghoa. Tionghoa lebih banyak digunakan oleh orang Tionghoa. Istilah ini tampak dari nama-nama organisasi sosial Tionghoa yang sudah ada sejak lampau sampai sekarang mulai dari Tiong Hwa Hwe Koan (THHK), Chung Hwa Chung Hui, Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) atau Paguyuban Warga Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI).

Soal mengapa Tionghoa lebih disukai oleh *Chinese* di Indonesia atau istilah Cina lebih pas di *lidah* warga pribumi itu bukanlah soal perasaan semata-mata. Ini soal identitas yang berkelindan dengan sejarah. Pendapat untuk menyebut seseorang sebagaimana orang itu menyebut dirinya ada baiknya digunakan. Bagaimana 'nasib' istilah Cina setelah 'dipensiunkan'? Biarlah istilah ini tersimpan sebagai khasanah dalam sejarah dan perkembangan sosial di Indonesia. Biarkan juga istilah itu hidup dalam ingatan masyarakat pribumi *toh*, sebagai ingatan istilah itu juga perlu untuk mengenang masa lampau, memetik hikmah agar masalah serupa tidak diulang lagi. Sejarah dalam sebuah puisi Arab didaulat sebagai *ibratun-li-man i'tibar* atau pelajaran bagi yang mau belajar kepadanya (noh).

SEJARAH KONFLIK, BUDAYA POLITIK, DAN KETEGANGAN DI ACEH MENJELANG PEMILU 2014

Oleh: Hasbullah

Pendahuluan

Konflik secara sosiologis merupakan proses interaksi sosial, di mana terdapat dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih yang memiliki perbedaan pendapat maupun tujuan yang menimbulkan pertentangan. Konflik pasti ada di pelosok dunia selama masyarakat masih ada, dan hilang apabila masyarakat sudah tiada. Secara syariat, konflik merupakan *sunatullah* atau ketentuan Allah Swt. Islam secara harfiah juga diartikan sebagai "perdamaian" atau "keselamatan" seperti yang dicantumkan dalam Al-Qur'an, Surah Annisa, ayat 91.

Pakar sosiologi Myer menyebutkan, konflik dapat dipahami dari dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang tradisional. Kedua sudut pandang kontemporer. Menurut sudut pandang tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Kelompok ini menginginkan konflik harus dihindari, karena dapat menyebabkan disintegrasi suatu kelompok atau organisasi. Kedua, konflik dari sudut pandang kontemporer adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari sebagai konsekuensi logis dari interaksi antarmanusia. Dalam pandangan kelompok kontemporer, yang dibutuhkan adalah solusi tepat sehingga tidak merusak hubungan antar pribadi maupun organisasi. Konflik harus kontruktif, bukan destruktif sehingga terjadi peningkatan kinerja organisasi tersebut.[1]

Menurut Rahn Dahrendorf dan Randall Collins, masyarakat memiliki "dua wajah", yaitu; konflik dan konsensus, maka teori sosiologi harus dibagi menjadi dua wajah juga, yaitu; teori konflik, dan teori konsensus.[2] Keduanya saling berketerkaitan, konsensus dapat menyebabkan konflik, konflik juga dapat menimbulkan konsensus dan integrasi.

Konflik terjadi karena hubungan sosial terganggu dan penggunaan kekerasan oleh pribadi atau kelompok di dalam lingkungan pergaulannya. Konflik juga dapat disebabkan oleh kepentingan sendiri-sendiri, maka benturan akan sering terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.[3]

Sejarah Konflik dan Damai di Aceh

Aceh adalah bagian dari wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berbentuk provinsi dengan segala dinamika sejarah konflik dan konsensus (damai) yang melingkupinya dari waktu ke waktu dalam kajian historis. Provinsi ini terletak di ujung paling utara bagian barat Indonesia pada koordinat 2° - 6° L.U. dan 95° - 98° B.T, dengan luas wilayah sekitar 57.365,57 Km. Sejak diintegrasikan menjadi kesultanan Aceh pada abad ke-16 oleh Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528) keseluruhan wilayah ini menjadi sangat multikultur karena mengintegrasikan banyak etnis dan subetnis.

[1] www.http//arenakami.blogspot.com/2012/06/manajemen-konflik-dalam-perspektif.html, diakses 12 Januari 2014.

[2] Idianto Muin, 2006. *Sosiologi SMA/MA 2 untuk Kelas XI*. Jakarta: Erlangga. Hlm.50.

[3] *Ibid*

Saat ini, provinsi Aceh terdiri atas 23 kabupaten/kota dengan 8 sub-etnis, dengan beragam matabudaya yang terdapat di seluruh wilayahnya. Duabelas partai politik nasional dan tiga partai politik lokal akan berebut kepercayaan masyarakat Aceh dalam Pemilu 9 April 2014.

Semenjak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Aceh sering digambarkan sebagai salah satu daerah dengan tingkat resistensi yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketika masih berbentuk keresidenan, di Aceh sudah berkecamuk berbagai persoalan menyangkut Revolusi Sosial pada akhir tahun 1945 yang diawali dengan Peristiwa Ceumbok di Lam Meulo (Kota Bakti) Pidie. Namun, di sisi lain, saat itu di Aceh dukungan terhadap "republik" atau "republiken" juga masih sangat besar yang dibuktikan dengan gelora perlawanan laskar dan pemuda Aceh terhadap agresi militer Belanda I dan II, termasuk dalam Perang Medan Area dari tahun 1948-1949.

Situasi politik nasional saat itu yang tidak menentu, di tengah kegalauan sistem pemerintahan membuat Aceh terintegrasi ke "Provinsi Sumatera Utara" yang beribukota di Medan pada tahun 1948. Hal ini menjadi polemik oleh sebagian besar elit Aceh yang menginginkan ibukota Sumatera Utara berada di Kutaraja (Banda Aceh). Bahkan, akhirnya sidang DPRD pertama provinsi Sumatera Utara akhirnya dipilih tempat netral yang berlokasi di antara Medan dan Kutaraja, yaitu di Tapaktuan Aceh Selatan pada tahun 1948.

"Provinsi Aceh" baru terbentuk dan disahkan pada tanggal 17 Desember 1949 dan berlaku sejak 1 Januari 1950 ketika masa peralihan dari RIS (Republik Indonesia Serikat) ke UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) tahun 1950.[4] Setelah Indonesia, kembali menerapkan UUD 1945 melalui suatu "Dekrit Presiden" 5 Juli 1959, situasi di Aceh baru saja kondusif setelah konflik vertikal dengan pemerintah pusat. Konflik ini mulai berangsur "damai" pada bulan Mei 1959, setelah diadakan "musyawarah" di Kutaraja yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat yang dikenal dengan "Misi Hardi", dengan "Dewan Revolusi Aceh", yang diwakili Hasan Saleh, Ayah Gani, dan Husin Almujahid. Di mana ketiganya telah "memisahkan diri" dengan pimpinan tertinggi DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) Aceh, Teungku Daud Beureueh saat itu. Tiga tahun kemudian, pada tanggal 9 Mei 1962, Teungku Daud Beureueh juga ikut "turun gunung" dan "bergabung kembali" dengan Indonesia. Namun, kembalinya beliau saat itu tidak terpublikasi, dan nyaris tidak diketahui secara umum oleh masyarakat Aceh.[5]

Lebih dari 10 tahun kemudian, ketika "sistem politis" nasional sedang dibangun oleh pemerintahan Orba (Orde Baru) dengan membentuk suatu kekuatan politik baru di seluruh pelosok Indonesia. Pemerintah Orba mulai melakukan integrasi politik dengan melakukan berbagai strategi, seperti; depolitisasi, deideologi, dan *floating mass* yang bekerja di bawah desain korporatisme negara, yaitu; melalui pembentukan organisasi politik dan sosial dengan tujuan pengendalian terhadap masyarakat sebagai suatu kontrol hegemoni.[6]

Provinsi Aceh yang sejak tahun 1970-an merupakan basis kuat partai politik Islam, seperti Masyumi, Perti, dan PPP tentu saja mendapat perhatian khusus dari pemerintah Orba. Lima tahun kemudian, yaitu; tahun 1982, Golkar

[4]Sejak Desember 1949 dan sampai April 1950 di Indonesia hanya tersisa 3 negara bagian, yaitu; RI, NST, dan NIT.

[5]M.Nur El Ibrahimy, 1980. *Kisah Kembalinya Tgk. Daud Beureueh Ke Pangkuan Republik Indonesia.* Jakarta: M.Nur El Ibrahimy. Hlm.4.

[6]Mohtar Mas'ud, 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru.* Jakarta: LP3ES. Hlm.13.

(Golongan Karya) sudah muncul sebagai kekuatan baru dan pemenang kontes Pemilu di Aceh. Pada saat yang hampir bersamaan, di Aceh juga mulai bermunculan gejolak baru seiring pendeklarasian GAM (Gerakan Aceh Merdeka) pada 4 Desember 1976 oleh Teungku Muhammad Hasan Tiro. Kelompok ini baru benar-benar mulai terdeteksi aksi-aksinya pada paruh akhir tahun 1970-an, ketika satu per satu tokohnya gugur dan ada yang mencari "suaka politik internasional" ke luar negeri. Tahun 1980-an, sekembalinya beberapa "personil separatis" dari kamp pelatihan militer di Libya, situasi di Aceh kembali bergejolak. Akibatnya, sebagian wilayah Aceh mulai diterapkan "Operasi Jaring Merah" sebagai suatu kebijakan operasi militer untuk mengentaskan perlawanan "separatis bersenjata" hingga berakhir pada Agustus 1998, setelah "kerusuhan 12 Mei 1998" di pusat pemerintahan Indonesia, Jakarta, dan beberapa kota besar lainnya di Jawa.

Konflik Aceh mulai mengalami peningkatan ekskalasi sejak akhir tahun 1999 dengan adanya isu referendum. Meluasnya ekses konflik pada akhir tahun 1999, sehingga diadakan upaya damai sejak Mei 2000. Selanjutnya dilakukan pemberian Otonomi Khusus "Daerah Istimewa" tahun 2001, dan upaya penghentian kekerasan oleh HDC (*Henry Dunant Centre*), sejak 10 Mei 2002, namun semuanya mengalami stagnasi.

Konflik baru benar-benar berakhir secara damai sejak 15 Agustus 2005 dengan adanya *MoU* Helsinki di Finlandia yang dipelopori Marti Ahtisaari. Sedangkan perwakilan pemerintah Indonesia diwakili oleh Hamid Awaluddin, dan perwakilan GAM Malik Mahmud Alhaitar. Perdamaian ini "*sunnatullahi*" karena dipicu oleh tragedi kemanusian terbesar dalam sejarah Indonesia karena peristiwa gempa bumi 8,9 SR yang disusul tsunami dahsyat pada tanggal 26 Desember 2004.

Pasca perdamaian (*MoU* Helsinki) tahun 2005, salah satunya berbuah lahirnya UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh), yang memungkinkan di Aceh adanya partai politik lokal. Sejak Pemilu tahun 2009, sudah ada beberapa kontestan partai lokal yang menjadi peserta Pemilu Caleg di Aceh, yaitu; Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA), dan Partai Bersatu Aceh (PBA). Setelah adanya regulasi, pada Pemilu Caleg 2014, partai politik lokal di Aceh hanya tersisa menjadi tiga partai lokal saja, yaitu: Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh. Dua di antaranya adalah "pecahan" dari Partai Aceh kontestan Pemilu 2009, yaitu: Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh. Elit kedua partai tersebut dihuni oleh mantan kombatan GAM. Sedangkan Partai Damai Aceh dihuni oleh kolaborasi tokoh ulama *Dayah* (pesantren) dan aktivis lokal Aceh.

Saat ini, gejolak politik menjelang Pemilu Caleg 2014 mulai terlihat. Berbagai serangan terhadap atribut partai lokal, maupun partai nasional sudah terjadi, terutama di pantai timur Aceh yang merupakan konsentrasi pemilih yang besar di Aceh (Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur dan Pidie). Sedangkan di wilayah yang massa pemilih relatif sedikit, seperti di pesisir barat dan pedalaman Aceh relatif lebih aman dan damai. Hal itu terlihat di antara *caleg* kontestan Pemilu.

Gejala peningkatan kekerasan juga mulai terlihat di sana, seperti halnya pembakaran mobil *Caleg* Partai Damai Aceh di Aceh Selatan dan penembakan *Caleg* DPRK Aceh Selatan dari Partai Nasional Aceh. Indikasi peningkatan potensi konflik menjelang Pemilu 2014 kian memanas, di antara perdamaian yang baru saja diretas yang berpotensi

menggiring kembali Aceh ke jalan kekerasan dan konflik horizontal, apabila tidak segera dicari solusi yang perdamaian yang bermartabat.

Budaya Politik dan Potensi Konflik Paska Damai Tahun 2005

Pakar politik dan budayawan Aceh menyebutkan, ada dua fenomena paska-*MoU* Helsinki 15 Agustus 2005. Pertama, para kombatan yang telah terintegrasi ke dalam masyarakat. Kedua, para elite GAM yang pernah menetap di luar negeri yang telah kembali ke Aceh. Sebagian di antara mereka telah menduduki beberapa posisi strategis di lembaga eksekutif dan legislatif. Bahkan, intensitas pertemuan para pejabat dari pemerintah pusat dalam menghadapi persoalan kekinian cenderung melibatkan mereka, ketimbang perwakilan dari masyarakat Aceh. Namun, di antara yang mau "berdamai" tersebut, disinyalir masih ada di antara mereka yang berkeinginan untuk tetap memisahkan diri dari NKRI.[7] Dari beberapa sinyalemen, ada responden yang menyebutkan bahwa pucuk pimpinan GAM, Teungku Hasan di Tiro merasa dikhianati oleh pembantu dekatnya. Akibatnya, keinginan untuk memperkarakan kedudukan Aceh ke dunia internasional, dengan berbagai isu pelanggaran HAM, posisi Aceh prakemerdekaan RI, dan tidak sahnya peran beberapa mantan elite GAM yang menjadi perwakilan perjuangan yang mereka lakukan di Aceh. Bahkan baru-baru ini telah muncul wacana Neo-GAM di kalangan mantan kombatan.[8]

Setelah *MoU* Helsinki 15 Agustus 2005, di Aceh sebenarnya sudah tidak ada lagi kata "merdeka", melainkan kata "damai". Harus diakui bahwa potensi kegagalan damai tercermin dari beberapa kali inisiatif perdamaian sebelumnya. Perdamaian yang digagas tanggal 15 Agustus 2005, memang sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi Aceh paska tsunami 2004. Tahun 2005 telah menjadi sebagai "titik akhir" dari segala permusuhan di antara Pemerintah RI-GAM dan sebagai awal perdamaian abadi. Mereka yang selama ini "bergerilya" di gunung telah turun ke *gampong* dan kota. Mereka yang selama ini menetap di luar provinsi dan luar negeri juga telah sama-sama kembali ke *tanoh indatu.*

Di sisi lain, pemerintah telah menciptakan beberapa slogan yang dinilai ampuh untuk menyosialisasikan perdamaian, yaitu "damai itu indah", "*geutanyoe mandum ta meusyedara*"(kita semua bersaudara), dan "Aceh aman ibadah nyaman". Namun begitu, ujung dari segala bentuk "konsensus baru" ini adalah Aceh harus tetap berada dalam bingkai "NKRI sebagai harga mati". Titik akhir inilah yang telah menciptakan rasa percaya diri bagi eksponen GAM untuk "mudik" dan "turun gunung". Mereka disambut layaknya "pejuang tempur" dan disanjung dengan gelar "*teungku*", bersanding dengan gelar "*teungku*" yang disebutkan kepada para alim, ulama, yang sudah mendalami ilmu agama di *dayah* bertahun-tahun lamanya.

Di samping itu, masih banyak mitos yang berkembang mengenai "perdamaian" atau lebih dikenal *"MoU Helsinki"* di masyarakat, mulai lobi-lobi, hingga perang urat syaraf di antara perunding RI-GAM yang difasilitasi oleh CMI (*Crisis Management Intitiative*) di bawah pimpinan Marti Ahtisaari di Helsinki, Finlandia. Mitos-mitos ini bisa membentuk interpretasi masing-masing di masyarakat Aceh yang berpotensi memicu konflik baru di Aceh, apabila banyak "*lalat mirah rueng*" (provokator) yang memanfaatkan momentum sekitar

[7]Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad dalam http://aceh.tribunnews.com/2013/06/17/isu-separatisme-aceh-paska-mou-helsinki diakses 7 Januari 2014.

[8]*Ibid*

persaingan di antara Parpol dan Caleg menjelang Pemilu *Caleg* 2014.

Pengetahuan Politik Lokal dan Warisan Konflik Aceh

Budayawan dan sejarawan mengatakan, ada gangguan psikis dari elit maupun masyarakat Aceh yang diakibatkan sejarah konflik yang sangat panjang sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu taktik licik "pemecah-belahan dan penjajahan" (*devide et impera*). Mereka tidak terjun langsung menjalankan taktik liciknya itu, akan tetapi "diwakilkan" kepada sekelompok orang dalam masyarakat yang rakus harta dunia dan menyepelekan siksa akhirat. Satiran terhadap orang serakah tersebut melahirkan *Hadih Maja* yang sepertinya terdengar menggelikan, namun realitasnya ada benarnya juga, yaitu: "*bak peng gadoh janggot, bak* (...) *gadoh ulama* (karena uang hilang karisma, karena ("perempuan") hilang ulama).[9]

Dalam realitas *tempo doeloe*, ada sebagian masyarakat ternyata bisa diperalat oleh penjajah Belanda; dalam bahasa Aceh mereka disebut "*loh*". Sekarang istilah "*loh*" lebih sering disebut "*cuak*" (spionase/intelijen). Tugas "*loh*" atau "*cuak*" adalah menciptakan disintegrasi di kalangan pejuang Aceh *tempo doeloe*, menyelidiki tempat-tempat persembunyian, membujuk laskar Aceh menghentikan perlawanan, dan lain-lain. Akibatnya banyak gerilyawan Aceh yang jadi korban. Hal itulah yang memunculkan kecurigaan dan kewaspadaan yang terus dihayati dari generasi ke generasi sehingga membentuk karakter masyarakat Aceh yang selalu "waswas dan curiga". Gejala psikis, seperti itu dipresentasikan oleh ungkapan *Hadih Maja* "*bu bu bit...ie ie bit...ma ma droe...laen gob bandum*" (air, air sumur...nasi, nasi biasa...ibu, ibu sendiri...selain itu orang asing semua). Ungkapan lainnya menyebutkan; "*meukon ie leuhob...meukon droe gob*", (kalau bukan air tentu lumpur, jika bukan diri sendiri tentulah orang lain). Ungkapan ini bermakna, selalu waspada dan curiga kepada orang lain, kecuali ibu sendiri. Orang lain selalu dianggap sebagai "saingan" dalam hidupnya. Namun di sisi lain, budaya politik di Aceh juga memiliki budaya damai, seperti; *suloh* (penyuluhan) dan *peusijuk* (penyejukan) sebagai upaya penyelesaian perdamaian secara adat di antara keduabelah pihak yang berkonflik.

Hadih Maja sebagai ungkapan yang digunakan dan diucapkan oleh masyarakat Aceh sebagai "*way of life*" atau "kearifan lokalnya".[10] Kecurigaan dan kewaspadaan masyarakat Aceh juga tersirat dalam ungkapan, "*pakat nyoe pakat jeh, teuma nyang theun rueng/dra kon na kamoe* (ajak begini, ajak begitu, nanti yang menanggung segala risiko hanya kami saja). Ungkapan tersebut muncul karena masyarakat yang sudah menderita akibat terlalu cepat menerima ajakan, tanpa terlebih dulu mengkaji dan menganalisis maksud dan tujuannya. Pengajak biasanya melepaskan tanggungjawab ketika "propaganda" telah menimbulkan permasalahan pelik di kemudian hari.[11] Akibatnya, masyarakat bersikap pasif terhadap berbagai "ajakan dan himbauan" yang dipelopori oleh seseorang atau kelompok tertentu. Ungkapan itu juga dipresentasikan oleh *Hadih Maja*, "*leumo bloh paya, guda cot iku*" (sapi menyeberang rawa, kuda yang terangkat ekornya). Maknanya, orang lain yang punya kepentingan, kita pula yang menjadi sibuk.

[9]T.A.Sakti, Trauma Sejarah Manusia Aceh dalam *Majalah Santunan* No.204. Banda Aceh: Kanwil Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Hlm. 24 – 25 dan 54.

[10]*Ibid.*

[11]*Ibid*

Pertarungan Elit Partai Politik Lokal dan Harapan Damai Pelaksanaan Pemilu 2014

Bara konflik mulai berasap lagi ketika para elite dari partai politik lokal (Partai Aceh) mulai tampak terpecah. Mereka akhirnya benar-benar membentuk partai lokal baru yang sama-sama mengusung para kombatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Lahirnya Partai Nasional Aceh pada 24 April 2012, membuat aura politis di Aceh semakin memanas. Hal ini mulai terlihat, ketika terjadi pemukulan terhadap mantan Gubernur Irwandi Yusuf di halaman DPRA di Banda Aceh setelah acara pelantikan Gubernur terpilih Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf pada tanggal 25 Juni 2012 oleh simpatisan Partai Aceh. Sejak saat itu, berbagai peristiwa kekerasan terus saja terjadi di lapangan di antara pendukung ke dua partai lokal tersebut yang sama-sama dihuni oleh kombatan GAM.

Sampai saat ini, berita-berita tindakan kekerasan kedua partai lokal tersebut, hampir tiap hari menghiasi *headlines* media massa lokal terkait Pemilu Caleg 2014, kendati pelaksanaan Pemilu baru dilaksanakan tanggal 9 April 2014. Perseteruan kedua partai politik lokal yang memiliki pendukung yang besar di Aceh. Elit kedua partai lokal ini pun adalah sama-sama kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Memanasnya situasi konflik di antara keduanya bisa berimplikasi kepada pelaksanaan Pemilu 2014 di Aceh.[12]

Adanya gesekan di antara keduanya dikuatirkan rawan memicu konflik terbuka di Aceh. Maraknya aksi penurunan atribut salah satu partai lokal yang diduga dilakukan oleh simpatisan partai lokal lainnya. Selanjutnya, aksi sekelompok orang yang diduga kader partai lokal yang melakukan pengeroyokan terhadap kader partai lokal lainnya, seperti yang terjadi di Kota Lhokseumawe dan tempat lainnya. Beberapa kasus lain yang dinilai rawan meletupkan konflik terbuka kedua partai lokal tersebut terjadi beberapa kali di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, khususnya di pantai timur bahkan di barat selatan Aceh. Perseteruan kedua partai lokal tersebut, bahkan telah merenggut beberapa korban jiwa dari pengurus di daerah, baik di Aceh Utara maupun di Aceh Selatan.

Selain itu, teror politik terkait perseteruan kedua partai lokal tersebut terus terjadi di beberapa daerah di Aceh.[13] Saat ini, konflik tersebut juga telah merembes ke partai lokal lainnya, seperti Partai Damai Aceh bahkan partai nasional Nasdem (Nasional Demokrat). Menurut Kapolda Aceh, rawan konflik terjadi menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, di mana potensi itu disebabkan adanya sisa senjata api ilegal, juga adanya dua partai lokal (PA dan PNA) yang rawan meletupkan konflik di Aceh. Ditambahkan elit, *caleg*, serta pendukung kedua parlok tersebut sama-sama mantan anggota GAM. Namun, dikatakan sejauh ini situasi keamanan menjelang Pemilu 2014 di Aceh masih cukup kondusif.[14]

Harapan provinsi Aceh yang aman dan damai setelah keluar dari pusaran konflik berkepanjangan sebelum *MoU* Helsinki 15 Agustus 2005, semoga tidak akan segera tercederai oleh kekerasan menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. Konflik dan segala tindakan kekerasan agar segera dihentikan, apabila kedua belah pihak mulai dari elitnya mau pun tim sukses Caleg dapat menahan diri agar nantinya Pemilu 2014 dapat berjalan secara jujur, adil dan demokratis serta aman dan damai.

[12] http://www.antaraaceh.com/2014/01/pemilu-aceh-di-antara-dua-kekuatan-partai.html diakses 1 februari 2014

[13] *Ibid*

[14] *Ibid*

Pengalaman pahit sejarah konflik dari waktu ke waktu telah membentuk karakter masyarakat Aceh menjadi dua sifat dengan nilai yang berbeda akibat bentukan masa-masa konflik yang penuh tantangan, baik fisik maupun psikis. Selain itu, semangat patriotisme-heroisme yang dimiliki oleh masyarakat Aceh karena perang frontal dan total, perang gerilyawan, dan juga "perang psikis", telah membentuk kepribadian masyarakat saat ini yang pantang menyerah juga pantang dikhianati. Belajar dari budaya politik masyarakat Aceh, seperti bunyi *Hadih Maja "wasiet han jeuet meu-ubah", "amanah han jeuet meutuka"* (wasiat tak boleh diubah, amanah tak boleh digantikan). Sedangkan ungkapan lokal Aceh yang lain menyebutkan,*"so nyang deungki-khianat, meuwoe laknat u ateueh droe"* barangsiapa yang berkhianat, kembali laknat-musibah kepada dirinya sendiri).

Sikap masyarakat Aceh sangat benci terhadap perilaku bermuka dua atau munafik, seperti ungkapan, *"munapek; di luwa bee bu, di dalam bee ek"* (munafik; di luar bau nasi, di dalam bau tahi). Kecaman pepatah Aceh terhadap orang yang bertindak seperti itu, dianalogikan sebagai "*bubee dua jab*" atau "bubu dua kepala".

Masyarakat Aceh saat ini sebenarnya sudah sangat kukuh jiwa dan pendirian mereka sejak dulu, seperti tercermin dari ungkapan : "*Allah keu tuhan, Muhammad keu nabi...laen beurang ri hana lon taba*" (Allah sebagai tuhan...Muhammad sebagai nabi...lain apa pun itu...dianggap biasa saja). Selain itu, masih ada ungkapan yang bernada sama, yaitu; "*nibak puteh mata bah puteh tuleueng, bahle teugageueng dalam blang raya*" (daripada hidup bercerminkan bangkai, lebih baik mati berkalang tanah).

Masyarakat Aceh juga memiliki budaya malu secara adat, seperti ungkapan, *"bak sampe lagee nyan malee, na nyuem talob lam tanoh"* (kalau sampai begitu memalukan, rasa-rasanya lebih baik masuk ke kubur). Hal inilah yang bisa membuat potensi konflik di Aceh besar, karena kegigihan mereka dalam mengejar prestasi dan prestise; sebagai simbol harga diri atau wibawanya masing-masing (*tueng bila*). Apabila budaya seperti ini diinterpretasikan dengan logika masing-masing, atau kelompok per kelompok dari generasi ke generasi, bisa diprediksi konflik dan damai akan selalu beriringan dari waktu ke waktu.

Penutup

Perjalanan dan dinamika sejarah Aceh telah membentuk karakter masyarakat yang positif maupun negatif. Keresahan, kegelisahan, penipuan, sabotase, berkabung, teror, kekecewaan; dan kesusahan-kesusahan lainnya terus-menerus dialami mereka. Sedangkan budaya politik "sakit hati" di antara masyarakat sebagai warisan sejak masa kolonial ternyata sudah merasuk di relung-relung hati mereka, sehingga sangat sulit "dibersihkan" dari darah-dagingnya. Ungkapan lokal "*lagee tacui duroe ngon alee*", (bagaikan mengorek duri dengan alu) mempresentasikan tentang keadaan tersebut. Sejarawan Taufik Abdullah beberapa tahun yang lalu juga pernah mengingatkan, "sejarah di Aceh bukanlah sesuatu yang lampau, tetapi sesuatu yang selalu aktual, selalu hidup. Barangkali dari sini pula sebaiknya dimulai usaha untuk mengerti Aceh akan lebih mudah". [15]

Trauma sejarah masyarakat Aceh, baik secara psikis maupun fisik, di satu sisi telah melahirkan budaya konflik. Di sisi lain, masih ada budaya damai (*suloh* dan *peusijuk*) yang diwariskan secara turun-temurun juga bisa direaktualisasikan lagi. Tinggal saja spirit para elit yang berkonflik

[15] Taufik Abdullah, 1987. "Islam dan Masyarakat : Pantulan Sejarah Indonesia". Jakarta : LP3ES. hlm.163 dalam T.A. Sakti, *Op.Cit.*

untuk sama-sama mengakhiri secara damai demi masyarakat Aceh. Hal itu penting disadari oleh semua pihak, untuk menciptakan kemakmuran dan kemajuan pembangunan di provinsi Aceh di masa mendatang. Masyarakat Aceh masih berharap kesejukan, kedamaian, dan kesejahteraan sehingga wujud negeri syariat dan bermartabat seperti yang telah diwarisankan *indatu* (nenek moyang) di masa lalu bisa direalisasikan. Bukan sebaliknya, justru menambah beban trauma dan derita masyarakat yang akan melahirkan kembali generasi "*Aceh pungo*", "*Atjeh moorden*" (pembunuhan ala Aceh *tempo doeloe*) akibat interpretasi "*tueng bila*" (harga diri) yang salah kaprah. Budaya politik *"homo homini lupus"* (*poh-meupoh sabee keudroe-droe*) harus segera diakhiri, karena kita semua bersaudara, baik itu *syedara "wali ngon karong"* (saudara dekat), *syedara lingka* (tetangga), *syedara gampong* (se-daerah), dan *syedara saboh agama* (se-iman) yang berbeda ideologi politik dengan kita. *Wallahu alam.*

Hasbullah, S.S. adalah Peneliti Muda Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

PEMILU DI ACEH: BELAJAR DARI INSTITUSI POLITIK LOKAL

Oleh: Nurmila Khaira

Pendahuluan

Politik, merupakan kata yang sering kali dikaitkan dengan bagaimana sebuah pemerintahan atau negara berjalan. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara umum mendefinisikan sebagai sebuah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti mengenai sistem pemerintahan atau dasar pemerintahan. Namun lebih jauh, politik dapat didefinisikan sebagai sebuah cara bertindak dalam menghadapi suatu masalah yang berhubungan dengan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.[1]

Definisi kata yang menyebutkan politik sebagai sebuah cara bertindak dengan kebijaksanaan dirasa tepat jika kita sandingkan dengan kehidupan sosial masyarakat Aceh yang berbudaya. Terbukti dengan berbagai adat dan tradisi serta kearifan lokal masyarakat Aceh yang mengutamakan unsur dan nilai demokrasi dalam mengambil keputusan. Dari berbagai macam contoh, sebut saja satu tradisi yang kental akan nilai demokrasi pada masyarakatnya, yaitu tradisi *Mencedekken Sapo* pada masyarakat Suku Singkil di Kabupaten Aceh Singkil. Tradisi ini merupakan tradisi mendirikan rumah yang membutuhkan peran *Sintua* (kepala mukim) dalam mengambil keputusan, peran kepala desa dan perangkatnya serta tokoh agama dan pegawai mesjid dalam mengambil keputusan seputar siapa dan alasan seseorang dapat mendirikan rumah di desa atau mukim tertentu. Di sini, musyawarah merupakan cara yang diambil *Sintua* dan seluruh perangkat desa dalam menentukan apakah seseorang dapat bermukim atau tidak.

Selain itu, tradisi *khanduri laot* pada masyarakat Aceh juga menjadi cerminan bagaimana musyawarah mufakat dapat menciptakan sebuah kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Sering kali, sebelum *khanduri* dilaksanakan, para nelayan dan tokoh masyarakat yang dipimpin oleh *panglima laot* duduk bermusyawarah untuk mempersiapkan pelaksanaan *khanduri* tersebut[2]. Belum lagi eksitensi *Tuha Peut* sebagai sebuah lembaga adat yang berfungsi sebagai tata pemerintahan di tingkat paling rendah yaitu tingkat *gampong*/kampung.

Tradisi-tradisi tersebut merupakan cerminan kuatnya budaya politik pada masyarakat Aceh dalam konteks melaksanakan tata pemerintahan yang menggunakan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Namun sayangnya, dewasa ini kita justru sering disuguhi oleh cara bertindak yang tidak santun dalam mengurusi sistem pemerintahan. Khususnya pada "musim" pemilihan umum sekarang ini, banyak sekali suguhan-suguhan berita mengenai cara berpolitik yang menimbulkan pertanyaan baru, "apakah politik tidak lagi bermakna sebuah pengetahuan untuk mengambil keputusan secara bijaksana?"

Tuha Peut, Kearifan Intitusi Politik Lokal pada Masyarakat Aceh

[1] http://kamusbahasaindonesia.org/politik. Diakses tanggal 3 Maret 2014.

[2] Darwis A. Sulaiman, 2011. *Kompilasi Adat Aceh*. Banda Aceh: PUSMA. Hlm. 107.

Tuha Peut dalam sistem pemerintahan *gampong* merupakan wujud dari diberlakukannya Qanun nomor 5 tahun 2003 sebagai badan perwakilam gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong. Lembaga ini berfungsi sebagai tata Pemerintahan gampong dalam hirarki sosial Aceh dan telah ada sejak zaman kesultanan Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun1607-1636 M. [3]

Fungsinya pun tidak main-main. Sesuai isi qanun, *Tuha Peut* memiliki fungsi diantaranya membahas *reusam gampong* dan melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas atau merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan *keuchik* atas *reusam gampong*. Selain itu, Tuha Peut juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah gampong. [4] Pada zaman Kesultanan Iskandar Muda, *Tuha Peut* dijaga keberlangsungannya oleh lembaga itu sendiri dan apabila seorang *uleebalang* meninggal atau tidak lagi dapat menjalankan tugasnya, maka *Tuha Peut* wajib menunjuk seorang *uleebalang* baru melalui proses musyawarah. Kedudukan Tuha Peut pun bersifat turun temurun. Dalam pengangkatannya berlaku prinsip hak *ayah meuwo bak aneuk*, hak ayah jatuh kepada puteranya dan merupakan keturunan dari keluarga yang dapat dipercaya oleh masyarakat sekitarnya.[5]

Keberlangsungan eksistensi *Tuha Peut* dilakukan tanpa kampanye. Masyarakat gampong dengan sendirinya cenderung lebih meyakini bahwa *Tuha Peut* beranggotakan warga-warga yang memang mengetahui betul kondisi gampong tersebut. Secara tidak langsung, kontrol masyarakat sekitar untuk mengetahui dan menyadari siapa yang mereka hormati dan "tua"kan akan muncul. Sehingga jika orang tersebut menjadi bagian *Tuha Peut*, masyarakat akan menerima hal tersebut.

Begitu juga dengan institusi *Panglima Laot* yang lagi-lagi dipilih atau ditunjuk tanpa perlu kampanye. Nasamuddin dalam Graf menyebutkan bahwa secara mufakat, *Panglima Laot* dipilih oleh para nelayan dalam satu wilayah *Lhok* (desa atau wilayah pantai).[6] Sedangkan yang disebut dengan masyarakat nelayan adalah *pawang pukat, aneuk pukat* dan *jalo kawee*. Mereka yang memilih calon *panglima laot* dan mengajukannya kepada *imeum mukim* untuk diangkat dan dipilih.[7]

Panglima Laot bertugas sebagai koordinator kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan adat yang berhubungan dengan penangkapan ikan di laut utamanya mengatur area dan hari penangkapan ikan serta menyelesaikan sengketa bagi hasil.[8]

Lembaga atau instisusi lain yang juga memiliki peran di tata pemerintahan *gampong* adalah *keuchik*, *imeum mukim*, *imeum meusejid* dan beberapa institusi atau lembaga pemerintahan *gampong* lain. Yang menarik adalah bahwa posisi-posisi tersebut tidak perlu diraih oleh yang bersangkutan dengan usaha yang berlebihan. Masyarakat di lingkungannya akan dengan sendirinya menilai siapa yang pantas untuk menduduki posisi-posisi tersebut. Bahkan, pada posisi tertentu, seseorang bisa menjabatnya hingga seumur hidup jika masyarakat memang merasa bahwa ia masih pantas dan memiliki

[3] Misri A. Muchsin, "Eksistensi Tuha Peut dalam Lintasa Sejarah Budaya Aceh" dalam *Jurnal Suwa* Nomor 14, April 2012. Banda Aceh: BPSNT Banda Aceh. Hlm. 93.

[4] *Ibid.*, hlm. 94.

[5] *Ibid.*, hlm. 98

[6] Arndt Graf, et al, 2010. *Aceh: History, Politics and Culture*, Institute of Southeast Asian. Hlm. 98

[7] Misri A. Muchsin, *op.cit.*, hlm. 104.

[8] *Ibid.*, hlm. 104

kebijaksanaan dalam melasanakan tugas yang diembannya.

Hal ini tentu berbeda dengan bagaimana seorang legislator dipilih, dalam hal ini seorang calon anggota legislatif dalam sistem pemeritahan daerah Aceh, diantaranya Dewan Perwakilan Daerah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (tingkat) Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah (tingkat) Kabupaten/Kota. Lembaga legislatif ini sendiri bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan (*checks and balances*) terhadap pemerintahan (lembaga eksekutif) yang sedang bergulir beserta kebijakannya.[9] Untuk dipilih, seorang calon anggota legislatif harus melaksanakan kampanye agar masyarakat luas mengetahui visi dan misi yang ia miliki. Lewat kampanye dan orasi, para calon anggota legislatif mencoba meyakinkan masyarakat bahwa visi dan misinya memang yang paling dibutuhkan masyarakat. Lalu pertanyaan lain muncul, "apakah politik yang kondusif masih bisa dicapai dengan cara-cara yang bijaksana?"

Politik bagi Masyarakat Aceh (saat Pemilu sekarang ini)

Saat ini Aceh-seperti wilayah lain di seluruh Indonesia- sedang disibukan dan dimeriahkan dengan kegiatan kampanye para calon anggota legislatif beserta partai pendukungnya. Wajah-wajah para calon legislator terpampang di setiap persimpangan jalan hingga ke warung-warung. Lalu, pada tanggal 15 Maret yang lalu, kampanye terbuka pun dimulai. Seluruh partai dengan calon yang diusungnya beramai-ramai menyampaikan orasi. Namun sayangnya, kemeriahan "pesta demokrasi" ini harus dibumbui dengan berita-berita yang mengkhawatirkan mengenai bagaimana "orang-orang politik" ini menyampaikan kekuatan visi dan misi -serta idealisme- dari partai politiknya.

Insiden yang terjadi menjelang kampanye hingga masa kampanye sekarang ini tidak hanya melibatkan tiga partai lokal, namun juga ikut melibatkan dua partai nasional. Bahkan sebelum kampanye dimulai, tepatnya setelah dilaksanakannya deklarasi ikrar Pemilu Damai, terjadi pengrusakan posko Kantor Partai Aceh Dewan Pimpinan Sagoe (DPS) Lueng Bata Banda Aceh yang digranat.[10] Di Meulaboh, TNI menemukan indikasi adanya intimidasi dan pemaksaan kepada masyarakat untuk memilih partai tertentu[11] dan penculikan kader Partai Nasional Aceh (PNA) yang terjadi di Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara[12], belum lagi adanya insiden penembakan terkait kader-kader partai. Dalam kampanye terbuka juga ditemukan orasi-orasi yang sifatnya mengintimidasi partai lain serta masyarakat.[13]

Jika kita kaitkan dengan pengertian politik sebagai sebuah cara bertindak yang berhubungan dengan kebijaksanaan, maka konsep tersebut tidak lagi menyentuh etika berpolitik para insan politik tersebut. Dalam konsep umum, Laswell dalam Rosati menyebutkan bahwa politik adalah "whos gets what, when and how".[14] Artinya, politik secara umum hanyalah perkara "siapa mendapatkan apa, kapan dan dengan cara apa". Tidaklah

[9] Riwanto Tirtosudarmo, 2007. *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 219.

[10] http://news.detik.com. Diakses tanggal 24 Maret 2014.

[11] http://aceh.tribunnews.com/2014/03/26/tni-temukan-kasus-paksa-pilih-partai-tertentu. Diakses tanggal 25 Maret 2014.

[12] http://aceh.tribunnews.com/2014/03/25/polisi-buru-penculik-kader-pna. Diakses tanggal 25 Maret 2014.

[13] Theglobejournal.com/politik. Diakses tanggal 25 Maret 2014.

[14] Jerel Rosati, *et al*, 2010. *The Politics of United States Foreign Policy.* Cengage Learning. Hlm. 6.

berlebih jika kemudian muncul kesimpulan bahwa demi urusan tersebut, seseorang mampu melakukan apa pun dan kapan pun dibutuhkan.

Insiden-insiden yang telah terjadi dalam dunia politik Aceh jelang Pemilu 2014 jelas menggambarkan bahwa masing-masing partai membutuhkan kemenangan sehingga banyak cara dilakukan dari waktu ke waktu, sesuai dengan pengertian yang dijabarkan Laswell. Akibatnya, politik yang seharunsya dianggap sebagai cara bertindak yang berhubungan dengan kebijaksanaan hilang dan muncul cara-cara yang agresif dan cenderung provokatif. Maka ketika partai-partai ini "berkuasa" dalam pemerintah daerah Aceh, bukan tidak mungkin pula kebijakssanaan dalam menjalankan pemerintahan pun hilang, digantikan dengan konsep berpikir "mendapatkan apa (sesuatu) dengan cara apa pun". Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Winarno[15]:

> "Banyak pengamat mengatakan bahwa anggota-anggota legislatif lebih cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan partai-partai politik yang diwakilinya dibangdingkan dengan memperjuangkan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional dalam pengertian yang luas. Kuatnya orieantasi kekuasaan dan kekayaan para anggota legislatif ini telah lembaga ini tidak peka terhadap kebutuhan dan tuntutan rakyat."

Penutup

Kondisi politik yang terjadi pada Pemilu 2014 ini ibarat nasi yang telah menjadi bubur, seolah tidak ada lagi benang merah yang menghubungkan antara kearifan lokal pada nilai kepemimpinan, mufakat dan kebijaksanaan pada lembaga *tuha peut, panglima laot* dan perangkat lainnya dengan kepemimpinan yang coba diraih oleh para calon anggota legislatif. Kepemimpinan dalam sistem sosial masyarakat Aceh yang seharusnya ditunjukkan melalui kewibawaan dan kepercayaan-berhak memimpin karena masyarakat memandang dia mampu-mulai diganti dengan nilai kepopuleran atas dirinya dan intimidasi.

Masyarakat diharapkan dapat mengambil pelajaran berharga dari kondisi saat ini. Pemerintahan yang adil dan bijaksana dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak mungkin akan tercapai dengan cara-cara yang ada sekarang ini. Pemerintahan yang baik, haruslah diusahakan dengan cara yang baik pula. Diharapkan, pada Pemilu lima tahun yang akan datang, generasi insan politik Aceh menjadi lebih baik dan lebih memahami kearifan lokal dari sistem organisasi sosial masyarakat yang telah ada, bahwa kewibawaan dan kebijaksanaan tidak dapat diciptakan secara tiba-tiba, tetapi dilahirkan.

[15] Budi Winarno, 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 95.

Mila Khaira, S.S. adalah Staf Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

PESTA DEMOKRASI MASYARAKAT ACEH: MEMILIH PEMIMPIN BERDASARKAN KUALITAS DAN POPULARITAS

Oleh : Cut Zahrina

Pendahuluan

Pesta demokrasi bukan wacana baru, bahkan setiap mendengar istilah tersebut pikiran kita langsung tertuju pada pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sebuah kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan suatu kebijakan berdasarkan keinginan masyarakat. Kegiatan kampanye ini, biasanya dilakukan dengan arak-arakan yang melibatkan massa dalam jumlah yang besar, sebagai pendukung partai tertentu, baik partai lokal maupun nasional. Dari partai-partai inilah lahirnya wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Wakil-wakil rakyat tersebut nanti yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pemerintahan maupun dalam pembuatan perangkat-perangkat hukum yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Itulah gambaran idealismenya seorang pemimpin sejati yang lahir dari pesta demokrasi.

Pemimpin sejati seharusnya bisa membawa masyarakatnya kepada kehidupan yang lebih baik, bukan memberikan masalah ataupun menambah masalah baru. Dinilai sebuah kegagalan apabila seorang pemimpin tidak dapat membawa masyarakatnya kepada kehidupan yang lebih baik. Begitu juga dengan nilai kesuksesan tentunya dengan kondisi yang sebaliknya. Pada dasarnya, tidak ada seorang pemimpin pun yang bisa berdiri pada kakinya sendiri untuk mendapatkan posisinya. Seperti penuturan Henry Kissinger, "*A leader does not deserve the name unless he is willing occasionally to stand alone.*" Seorang pemimpin tidak pantas mendapatkan nama kecuali bila dia memang terkadang berkeinginan berdiri sendiri. Jika kemudian semua yang membantunya itu dilupakan begitu saja, maka popularitasnya hanyalah sebuah bayang-bayang belaka yang dijadikan sebuah sensasi hanya untuk mendapatkan posisi. Selebihnya, semua hanya untuk diri sendiri saja bukan untuk yang lain ataupun untuk semua. [1]

Seorang negarawan sekaligus diplomat asal Rusia Nikita Kruschev, mengatakan "*Politicians are the same all over. They promise to build bridges even when there are no rivers.*" Politisi di mana-mana sama. Mereka berjanji membangun jembatan bahkan bila tidak ada sungai sekalipun. Seorang filsuf dan penulis dunia Leo Tolstoy, pernah berkata, "*Greatness is nothing without its simplicity.*" Kehebatan tidaklah berarti tanpa kesederhanaan. Biarpun hebat secara popularitas tetapi tidak memiliki kesederhanaan di dalam bersikap, maka seorang pemimpin bukanlah seorang pemimpin sejati. Hanya memikirkan hal-hal yang besar dan hebat namun lupa pada hal-hal yang dianggapnya kecil dan remeh seperti masyarakatnya sendiri yang mungkin dianggapnya tidak pernah ada kecuali menjelang pemilihan umum.[2]

---

[1] K. Permadi, 1996. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Manajemen.* Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 8.

[2] Timoer Soenarto, 1998. *Filsafat Kepemimpinan Dunia Pewayangan.* Surabaya:

Masyarakat Aceh, terkenal sebagai masyarakat yang hidup bernaung dengan syariat dan budaya. Syariat dan budaya mengandung nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber pada al-Quran dan Hadist. Kemudian melahirkan aturan dan norma untuk ketertiban masyarakat Aceh. Termasuk salah satunya adalah ketertiban dalam pertarungan politik yang berkembang dalam masyarakat Aceh. Seperti hadih maja Aceh mengatakan, "*Matee aneuk meupat jeurat, matee adat pat tamita*". Seandainya seseorang tidak lagi mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat, berarti seseorang atau anggota masyarakat tersebut tindak tanduknya telah menjurus kepada pemusnahan adat istiadat yang berlaku itu sendiri. Bila hal itu terjadi, bagaimana kemudian mengembalikan adat istiadat tersebut pada tempatnya semula. Oleh karena itu, hadih maja kembali berbicara ; "*Tajak beutroh takalon beudeuh, beek rugo meuh saket hate*". Apapun yang kita dengarkan, kerjakan atau lakukan, haruslah kita periksa atau pikir-pikir terlebih dahulu, jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Begitu juga hendaknya kita pandai menyikapi dengan bijak dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung. Sehingga nantinya akan terpilih wakil-wakil rakyat sebagai pemimpin masyarakat Aceh. Adalah sosok pemimpin yang berkualitas dalam segala aspek sebagai penunjang kinerjanya. Untuk membangun daerah Aceh yang sangat kita cintai ini. Untuk itu dalam tulisan ini, akan diulas sosok pemimpin masyarakat Aceh yang berkualitas. Dengan adanya kualitas maka popularitas akan datang sendirinya.

Popularitas dan Kepemimpinan

POPULER, sebuah kata yang mempesona. Kata ini sangat menyihir kehidupan manusia. Kebanyakan manusia menginginkan dirinya populer. Jarang sekali orang yang hidup di zaman ini yang tidak ingin populer, apalagi saat kesempatan populer itu terbuka di depan mata. Karena pesonanya yang luar biasa, banyak sekali orang ingin populer dengan melakukan apa saja, dari cara-cara yang positif hingga yang negatif. Popularitas memang menjanjikan banyak hal, yaitu ; dikenal luas, namanya melambung, memudahkan perolehan uang, sering dijadikan ukuran kesuksesan dan dipuja-puji sebagai orang hebat. Betapa hebatnya dengan menyandang sebutan seperti artis populer, penyanyi populer, pengusaha populer, politikus populer, penulis populer, pemikir populer, olahragawan populer, da'i populer, ulama populer dan pemimpin populer.

Keinginan menjadi seorang pemimpin yang populer adalah wajar dan manusiawi. Perlu diingat bahwa popularitas bukan tujuan hidup dan tidak menunjukkan kualitas hidup. Banyak orang populer, namun pola, kesadaran dan kualitas hidupnya buruk. Popularitas bukan ajaran hidup, ia hanya sebuah kembang kehidupan. Orang ingin populer karena pada dasarnya setiap orang senang dipuji dan popularitas identik dengan kata pujian dan sanjungan. Memuji sewajarnya adalah positif bila motivasinya memberikan penghargaan. Tapi, menerima pujian harus hati-hati. Menurut agama dan kesehatan jiwa, sering menerima pujian itu buruk. Sebaliknya, yang harus banyak kita terima dalam hidup adalah masukan, teguran, kritik dan nasehat, bukan pujian apalagi sanjungan.[3]

Pujian dan sanjungan membawa seseorang terlena dan lupa diri. Teguran dan nasehat akan membentuk kesadaran

Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Panunggalan. Hlm. 23.

[3] Fachry Ali, "Masalah Sumber Kepemimpinan Nasional Dewasa ini", dalam *Kompas*, 20 April 2001.

dalam meningkatkan kualitas diri. Sebagai simbol kesadaran moral, maka Nabi Muhammad SAW pernah menganjurkan untuk menyiramkan pasir pada wajah orang yang suka memuji. Pada kesadaran umum, pujian justru kita terima dengan senang dan membuat bangga diri. Bangga diri bahasa agamanya adalah 'ujub. 'Ujub itu negatif karena akan membentuk sikap mental senang dipuji. Padahal manusia itu pada dasarnya lemah dan banyak kekurangan. Dengan kata lain, manusia tidak layak dipuji dan menerima pujian. Karenanya, Islam mengajarkan, bila kita dipuji, kembalikan pujian itu kepada yang berhak menerimanya yaitu Tuhan Maha Pencipta dengan mengatakan: *"Alhamdulillahi rabbil 'alamin"*(segala puji hanyalah milik Allah Tuhan Semesta alam). Popularitas sesungguhnya adalah godaan hidup. Popularitas akan memalingkan orang dari niat-niat lurus dan tulus. Pujian, sanjungan, tepukan tangan, hormat orang dan kekaguman adalah hiasan yang melekat pada popularitas. [4]

Dampak Buruk Popularitas

Popularitas, dalam bentuk apapun, tanpa sadar, kebanyakan berdampak negatif bagi seseorang. Minimal mematrikan perasaan senang dipuji. Selebihnya adalah, kehidupannya bisa tidak lagi alami, tidak normal dan tidak wajar. Buruknya popularitas juga sering muncul dari banyaknya ungkapan, stigma atau klaim negatif yang menempel pada kata "populer." Misalnya, *"Emh... dia dulu sederhana, mau menyapa kita, mau duduk dimana aja, mau ngobrol bersama kita, sekarang sudah populer jadi lupa, sombong."* Atau, *"emh... itu mubaligh, dulu nerima honor berapa saja, diundang kemana aja mau, ke masyarakat kecil di kampung datang. Sekarang sudah populer, jadi pilih-pilih, pasang tarif. susah dihubungi. Ditemui pun jadi ribet, memakai sekretaris, diseleksi. Ekspresinya sudah berbeda, jaim, tidak lagi seperti dulu."* Ini adalah ungkapan-ungkapan umum yang sering dirasakan oleh masyarakat kepada orang yang menjadi terkenal dan sibuk dengan popularitasnya. Banyak orang yang setelah menjadi populer, tanpa sadar ada orang-orang tertentu yang kehilangan dirinya. Popularitasnya tidak bisa disalahkan, yang salah adalah perilakunya yang berubah.[5]

Popularitas yang Sebenarnya

Popularitas yang baik adalah popularitas yang tidak mendegradasikan nilai-nilai dan kesadaran dirinya sebagai manusia yang mulia. Popularitas yang baik hanya akan diraih dengan cara yang benar. Cara yang benar adalah, seharusya popularitasnya didapatkan sebagai akibat dari kerja keras, buah dari keikhlasan, hadiah dari dedikasi yang tulus dan murni, hasil dari mengekspresikan atau mengaktualisasikan potensi diri secara maksimal tanpa terbersit sedikit pun niat-niat dan keinginan menjadi populer. Dengan kata lain, popularitas yang benar adalah popularitas yang didapatkan bukan sebagai keinginan, tujuan, apalagi angan-angan. Sehingga dalam masyarakat berkembang dua jenis popularitas yaitu popularitas prestasi dan popularitas keinginan.

"Popularitas prestasi" berbeda dengan "popularitas keinginan." Dampaknya pun, secara psikologis sangat berbeda. Popularitas prestasi dapat mendorong upaya untuk kerja keras,

[4] Alfian Madjied, "Argumentasi tentang Keunggulan Muhammad", dalam *Pelita Jakarta*, 28 September 2002

[5] Ridwan Saidi, "Mengembangkan Kepemimpinan Dialogis", dalam *Kompas*, 8 Januari 2005

popularitas keinginan memproduksi khayalan dan angan-angan. Bagi popularitas yang benar atau diraih karena prestasi, dampak buruk pun tidak menjadi keburukan, tetap sebagai kebaikan bahkan menambah nilai dan bobot popularitasnya. Kita tahu Sokrates harus minum racun, Umar bin Khattab ditikam dari belakang, Utsman bin Affan dibunuh, Syekh Siti Jenar harus diadili dan mempercepat kematiannya, Galilio Galilei dipenjara seumur hidup. Al-Hallaj dihukum gantung, John F. Kennedy ditembak, John Lennon terkapar di ujung pistol penggemar fanatiknya. Kasus-kasus kematian para pemimpin tersebut, bukan karena keburukan popularitasnya, sehingga tidak juga memperburuk citranya. Sejarah mengenang kematian mereka dengan kemuliaan. Kita menyandingkannya dengan gelar syahid, pahlawan, tokoh atau pejuang kemanusiaan. Kematiannya justru membentuk legenda kepahlawanan dan puja-puji atas popularitas mereka.[6]

Popularitas dan kepemimpinan seseorang sangat berkaitan. keduanya sangat sulit untuk dipisahkan. Populer karena seseorang adalah menyandang atau terpilih sebagai pemimpin yang berkualitas. Pemimpin adalah orang yang berada di depan dan memiliki pengikut. Seorang pemimpin yang berkualitas dituntut mempunyai cara dan konsep, dalam mengatur pengikutnya, yaitu masyarakat. Masyarakat dan kepemimpinan menurut Ali Syari'ati merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Syari'ati berkeyakinan bahwa ketiadaan kepemimpinan menjadi sumber munculnya problem-problem masyarakat, bahkan masalah kemanusiaan secara umum. Menurut Syari'ati pemimpin adalah pahlawan, idola, dan insan kamil, tanpa pemimpin umat manusia akan mengalami disorientasi dan alienasi.[7] Ketika suatu masyarakat membutuhkan seorang pemimpin, maka seorang yang paham akan realitas masyarakat yang pantas mengemban amanah kepemimpinan tersebut. Pemimpin tersebut harus dapat membawa masyarakat menuju kesempurnaan yang sesungguhnya. Watak manusia yang bermasyarakat ini merupakan kelanjutan dari karakter individu yang menginginkan perkembangan dirinya menuju pada kesempurnaan yang lebih.[8]

Salah satu kesempurnaan seorang pemimpin adalah mempunyai sifat adil. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa, "karena keadilan, maka seluruh langit dan bumi ini ada. Imam Ali Bin Abi Thalib mendefiniskan keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang layak. Keadilan dapat diterapkan kepada manajemen dari semua urusan masyarakat. Keuntungannya bersifat universal dan serba mencakup.

Jalaluddin Rahmat dalam buku Yamani yang berjudul, Filsafat Politik Islam, menyebutkan bahwa secara terperinci seorang faqih (pemimpin) harus memenuhi syarat-syarat pemimpin sebagai berikut : [9]

1. Faqahah, mencapai derajat mujtahid mutlak yang sanggup melakukan istinbath hukum dari sumber-sumbernya.
2. 'Adalah, memperlihatkan ketinggian kepribadian, bersih dari watak buruk. Hal ini

[6] Marcel Beding, "Kepemimpinan Kharis dan Suhud", dalam *Kompas*, 17 September 2007

[7] Haidar Bagir dalam Ali Syari'ati, 1989. *Ummah dan Imamah*. Bandung: Pustaka Hidayah. Hlm. 32.

[8] Kartini Kartono, 1999. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: CV. Rajawali. Hlm. 31.

[9] Al-Milal wan-Nihal I/24 atau lihat Dr Ali As-Salus, 1998. *Imamah dan Khilafah dalam Tinjauan Syar'i*. Jakarta: Gema Insani Press. Hlm. 46.

ditunjukkan dengan sifat istiqamah, al shalah, dan tadayyun.

3. Kafa'ah, memiliki kemampuan untuk memimpin ummat, mengetahui ilmu yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat, cerdas, matang secara kejiwaan dan ruhani.

Di samping tiga unsur di atas, seorang pemimpin masyarakat Aceh harus mempunyai keahlian atau skill yang melekat pada dirinya. Memiliki komunikasi yang verbal, dapat memanfaatkan waktu dengan baik sehingga waktu tidak ada yang sia-sia, pengambilan keputusan yang tidak tergesa-tergesa sehingga keputusan tersebut memang tepat sesuai kebutuhan. Mengakui, menjelaskan dan memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Mendelegasikan wewenang, dapat menetapkan tujuan dan menjelaskan visi, memiliki kesadaran diri bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab, membangun kerja tim yang solid, dan dapat mengatasi konflik sehingga tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat.[10]

Kualitas Seorang Pemimpin

Untuk membangun masyarakat Aceh yang adil, damai, sejahtera dan makmur. Maka dibutuhkan pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang benar-benar dapat merakyat, dapat bergaul dengan semua lapisan masyarakat tanpa melihat golongan dan asal atau paham yang dimiliki oleh masyarakat. Seorang pemimpin yang ideal harus memiliki visi dan misi yang jelas dan realistis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga memang memiliki kemampuan untuk memimpin dan membangun Aceh sebagai daerah yang terkenal dengan julukan *Seuramo Mekkah* (Serambi Mekkah).

[10] *Ibid.*, hlm 48

Disamping itu, dalam sejarah dahulunya Aceh dikenal sebagai daerah yang mempunyai tiga keistimewaan yaitu, bidang agama (pelaksanaan syariat Islam), bidang pendidikan dan adat istiadat. Masyarakat Aceh mempunyai sebuah karakter yang khas dan unik terutama pada karakter manusia dan budayanya. Kekhasan tersebut dapat dibandingkan dengan kultur masyarakat lain yang ada di Indonesia, adalah sikap militansi dan loyal atau patuhnya masyarakat Aceh kepada pemimpin.

Sikap militansi masyarakat Aceh sudah ada dan berkembang sejak ratusan tahun lalu, dimulai pada masa pendudukan Belanda sampai konflik bersenjata antara GAM-RI. Semangat rela berkorban, berjuang dan berperang sampai titik darah penghabisan yang sudah ditempa sekian lama telah mengental, mengkristal sehingga melahirkan sebuah budaya yang melekat erat dalam setiap karakter masyarakat Aceh. Hal ini kita dengarkan dalam syair-syair do da idi, yaitu senandung nina bobo bayi yang mengajarkan dan mengajak sang bayi agar ketika dia dewasa nanti, ikut ke medan perang untuk berjuang membela bangsa. Sikap militansi berikutnya adalah loyal dan patuh pada pemimpin. Loyalitas dan kepatuhan bagi orang Aceh sebenarnya sebuah nilai dengan harga mahal. Sebab, agar orang Aceh menjadi loyal dan patuh, sang pemimpin haruslah jujur, setia kepada rakyatnya, tidak ingkar janji, bijak dalam pelayanan serta percaya kepada rakyat.[11]

Sikap kepatuhannya kepada pemimpin, ini terbukti pada masa perjuangan merebut kemerdekaan. Orang Aceh rela memberikan segala harta bendanya kepada pemerintahan Indonesia untuk membeli sebuah pesawat bernama RI

[11] Muliadi Kurdi, 2009. *Aceh di Mata Sejarawan Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya.* Banda Aceh: LKAS. Hlm. 164.

01. Pembelian pesawat tersebut bukti kepatuhan dan loyalitas orang Aceh terhadap Soekarno karena beliau menjanjikan penetapan syariat Islam di Aceh. Janji itu disampaikan Soekarno kepada Tengku Daud Beureueh pada 16 Juni 1948. Selanjutnya, masyarakat Aceh memberikan kemenangan telak kepada partai Demokrat dan secara khusus kepada SBY dalam pilpres 2009. Tercatat 93% masyarakat Aceh memilih SBY. Ini juga bukti kepatuhan dan loyalitas orang Aceh terhadap SBY, karena dalam masa pemerintahannya SBY telah memberikan sesuatu yang berharga untuk masyarakat Aceh yaitu perdamaian.[12]

Sikap loyal dan patuh masyarakat Aceh terhadap pemimpin sebagai sebuah harga yang mahal. Untuk itu, menjadi sebuah catatan kepada seorang pemimpin jangan sekali-kali ingkar janji. Jika sampai hal itu terjadi bukan tidak mungkin masyarakat Aceh akan memberontak dan bahkan menyimpan dendam yang panjang. Mohd Harun dalam tulisannya *'Memahami orang Aceh'* (April 2009), ada lima prototipe watak orang Aceh, yaitu: [13]

Pertama adalah reaktif artinya sebagai sebuah sikap awas atas harga diri yang keberadaannya dipertaruhkan dalam konstelasi sosial budaya. Orang Aceh sangat peka terhadap situasi sosial disekitarnya. Orang Aceh tidak suka diusik apalagi diejek, *'Aceh han me ceb'* (Aceh pantang diejek) sebab, kalau tersinggung dan menanggung malu reaksi yang timbul adalah akan dibenci dan bahkan menimbulkan dendam.

Kedua adalah militan artinya memiliki semangat juang yang tinggi, bukan hanya dalam memperjuangkan makna hidup tetapi juga dalam mempertahankan harga diri atau eksistensinya. *'Reuncong peudeueng pusaka ayah, rudoh siwah kreih peunulang. Nibak udep dalam susah, bah manoe darah teungoh padang'* (Rencong, pedang pusaka ayah, rudoh, siwah keris warisan. Daripada hidup di dalam susah, biar bermandikan darah di tengah padang).

Ketiga adalah optimis hal ini tampak dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. Orang Aceh beranggapan bahwa setiap pekerjaan yang kelihatan sulit dan berat harus dicoba dan dilalui. *'Siploh pinto teutob, na saboh nyang teuhah'* (sepuluh pintu tertutup, ada satu pintu yang terbuka).

Keempat adalah konsisten. Hal ini tampak dalam sikap dan pendirian yang tidak plin plan, tegas, taat asas apalagi jika berkaitan dengan harga diri dan kebenaran. *'Cab di batee labang di papeuen, lagee ka lon kheun hanjeut metuka'* (cap pada batu paku di papan, seperti sudah kukatakan tidak boleh bertukar).

Kelima adalah loyal. Hal ini amat berkaitan dengan kepercayaan. Jika seseorang, lebih-lebih pemimpin, menghargai, mempercayai, tidak menipu, tidak mencurigai orang Aceh maka mereka akan membaktikan diri sepenuhnya kepada sang pemimpin. *'Adak lam prang pih lon srang-brang. Bah mate di blang ngon sabab gata'* (walau dalam perang pun saya berkorban, biarlah mati dalam perang demi anda).

Penutup

Pesta demokrasi bangsa Indonesia adalah sebuah perayaan kebebasan masyarakat Indonesia untuk ikut dalam pemilihan umum, adanya pesta domokrasi ini juga menjadi sebagai perkembangan sejarah dan budaya perpolitikan di Indonesia. Demokrasi adalah simbol kebebasan rakyat dalam menyampaikan segala bentuk aspirasinya. Seperti harapan

[12] "KIP Aceh Selesaikan Pleno Rekapitulasi Suara", dalam *Serambi Indonesia*, 2 Mei 2009

[13] Mohd. Harun, 2009. *Memahami Orang Aceh*. Bandung: Cita Pustaka. Hlm. 22.

rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Aceh khususnya, siapa saja yang terpilih sebagai wakil rakyat, jadilah pelopor bagi masyarakat, dengan selalu memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Sekarang ini, pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemimpin yang berkualitas yang dapat dihandalkan dalam segala bidang. Dengan kemampuan dia memimpin maka ia adalah pemimpin yang berkualitas sehingga dia tidak mengecewakan pengikutnya dengan sendirinya dia akan menjadi popularitas dalam masyarakatnya, yaitu sebagai pengikutnya. Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang selalu menjunjung tinggi norma-norma agama dan budaya, begitu juga dengan karakter pemimpinnya sebagai karakter ureung Aceh yaitu orang Aceh yang terkenal militan (keras dan tegas), loyal (terhadap agama, budaya dan pengikutnya). Itu merupakan karakter dan juga sebagai cerminan masyarakat Aceh ketika dia menjadi sosok pimpinan. Diharapkan mampu membawa perubahan dan perkembangan daerah Aceh, sehingga Aceh menjadi salah satu pilar untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Cut Zahrina, S.Ag. adalah Peneliti Muda Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

ORIENTASI POLITIK *UREUNG* ACEH DARI MASA KE MASA

Oleh: Agung Suryo Setyantoro

Pengantar

Salah satu topik yang menarik dikaji ketika membicarakan *ureung* Aceh adalah dinamika politik dalam masyarakatnya. Politik di Aceh begitu dinamis, bahkan hingga ke warung kopi pun politik menjadi menu perbincangan. Tak salah ketika penulis berbicara dengan salah seorang Kepala BPS suatu kabupaten di Aceh menyebutkan bahwa prosentase partisipasi politik orang Aceh merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia dalam pemilihan umum.

Tulisan Clifford Geertz, *The Religion of Java*, sekalipun banyak dikritik tetapi telah membuka wacana baru dalam kajian politik Indonesia dengan menjelaskan bahwa politik di Indonesia semua didasarkan pada nilai budaya yang berlaku di masyarakatnya.[1] Di Aceh sendiri politik juga demikian, tak bisa dilepaskan dari budaya yang melingkupinya. Untuk memahami orang Aceh kita harus mengetahui latar belakang budayanya, di mana secara antropologis, semua orang Aceh sebenarnya merupakan masyarakat teritorial keagamaan. Karena itu, kehidupan keluarga di Aceh mendiami suatu wilayah yang disebut *gampong* dan kehidupannya berkisar pada *meunasah* dan masjid.[2]

Untuk melihat bagaimana orientasi politik *ureung* Aceh kita dapat merunutnya ke belakang, bagaimana saluran-saluran politik masyarakat Aceh yng tergambar dari peran tokoh-tokohnya hingga dari hasil Pemilihan Umum yang pernah berlangsung di Provinsi Aceh.

Politik *Ureung* Aceh Masa Lalu

Kehidupan masyarakat Aceh dalam lingkup terkecil secara politis dimulai dari tataran *gampong*. *Gampong* dipimpin seorang *keuchiek*. Pada masa dahulu, *keuchiek* merupakan pembela kepentingan dan keinginan warga, berhadapan dengan *uleebalang* maupun dengan *gampong* lain.

Keuchiek dalam perspektif *gampong*, tidak hanya berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat dan wilayahnya. *Keuchiek* juga bertindak sebagai pemangku adat di tingkat *gampong*. Dalam melaksanakan tugasnya, *keuchiek* dibantu *tuha peut* (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki kelebihan). *Tuha peut* umumnya memikul tugas rangkap, di samping sebagai penasihat *keuchiek* juga sebagai pemikir, penimbang dan penentu dasar-dasar hukum atas sesuatu keputusan atau ketetapan adat. Kecuali itu, dalam kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang harus berposisi sebagai dewan juri.[3]

Pola kelembagaan adat Aceh sebenarnya merupakan sistem yang relatif telah cukup demokratis, karena segala keputusan yang diambil oleh *keuchiek*

[1] Kuntowijoyo, 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm. 173.

[2] Lihat Heru Cahyono, 2008 . "Potret Kelembagaan Gampong yang Lumpuh di Meuria, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara", dalam Irine Hiraswati Gayatri (ed.), *Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa Yang Bergejolak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI. Hlm. 279.

[3] *Ibid.*, hlm. 280-281.

harus terlebih dahulu dikomunikasikan dan dimusyawarahkan dengan *tuha peut*. Bahwa sebuah kebijakan baru memiliki legitimasi kuat dan dianggap sebagai kebijakan bersama seluruh warga *gampong* apabila mekanisme tersebut dijalankan.[4]

Lebih maju lagi ke masa Pra-Orde Baru hingga Orde Baru, politik praktis di Aceh salah satunya terepresentasikan dalam ajang Pemilihan Umum yang berlangsung rutin lima tahun sekali. Kultur Aceh yang bercorak Islami mampu memberikan warna tersendiri pada hajatan pemilu. Terbentuknya identitas politik Islam di Aceh sendiri mulai terukir di hasil pemilu pertama tahun 1955. Aceh, yang saat itu masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara, dikuasai oleh partai-partai Islam. Gabungan suara yang diraih partai-partai "hijau" ini tercatat mencapai 90,5 persen. Partai Masyumi menjadi partai peraih suara terbesar dan memenangi pemilu dengan menguasai tiga perempat bagian pemilih. [5]

Memasuki era Orde Baru, Golkar muncul sebagai pesaing kuat partai Islam di Aceh. Di pemilu 1971, kekuatan politik Islam di Aceh teredam oleh kekuatan Golkar. Di pemilu tersebut, Golkar meraih separuh bagian suara, selisih tipis dari gabungan partai Islam yang kemudian menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan raihan suara mencapai 48,9 persen, sedangkan sisa suara diraih Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dengan 1,4 persen suara.[6] Namun kemenangan Golkar di Pemilu 1971 ternyata belum diimbangi dengan penetrasi politik yang mengakar di Aceh. Hal ini terbukti dengan kembalinya PPP menjadi pemenang Pemilu 1977 dan 1982 dengan pencapaian suara yang hampir mencapai 60 persen. Setelah itu, kekuasaan rezim Orde Baru kembali menguat di Aceh. Pada Pemilu 1987, PPP yang menjadi representasi kekuatan politik Islam di Aceh kembali harus takluk di tangan Golkar. Kekuasaan Golkar di Aceh bertahan sampai Pemilu 1997 yang notabene pemilu terakhir di era otoritarian tersebut.[7]

Dominasi politik Islam di Aceh kembali mencuat di era reformasi. Pemilu 1999, partai-partai bernuansa Islam kembali merebut sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai Golkar. PPP kembali memenangi pemilu dengan mendulang 28,8 persen suara. Namun, dominasi partai Islam ini juga tidak bertahan. Partai Golkar kembali meraih kemenangan di Aceh pada Pemilu 2004 dengan torehan suara mencapai 16,2 persen, berada tipis di atas PPP yang meraih 13,8 persen suara. Dominasi Partai Golkar di pemilu tersebut menjadi sinyal, sentimen Islam tidak menjadi orientasi dominan bagi pemilih Aceh untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu tingkat nasional.[8]

Melihat grafik naik turunnya jumlah suara yang diraih partai peserta pemilu, Agama Islam menjadi isu yang sensitif di masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh yang terkenal fanatik dengan Islam cenderung menyalurkan aspirasi politiknya ke partai berbasis Islam. Ulama sebagai tokoh agama yang begitu sentral dalam masyarakat tak luput dijadikan "alat" untuk menggalang massa. Golkar sebagai partainya "penguasa" pun turut mengerahkan ulama sebagai garda terdepannya. [9]

---

[4] *Ibid.*, hlm. 281.

[5] Berebut Nasionalisme di Kancah Lokal, dalam http://otomotif.kompas.com/read/2009/04/03/09120621/direktori.html (akses: 25 Oktober 2013).

[6] *Ibid.*

[7] *Ibid.*

[8] *Ibid.*

[9] Wawancara Abu Saifuddin (Mantan Anggota DPRD Kab. Aceh Utara), 16 November 2013 di Lhokseumawe.

Politik Ureung Aceh Masa Kini

Martabat ulama dalam masyarakat Aceh amat tinggi nilainya. Hal ini dibuktikan dalam sejarah dengan begitu banyaknya kontribusi ulama selama pemerintahan di Aceh, terutama sebagai sumber meminta fatwa dan memecahkan masalah.[10] Saat ini politik identitas yang beragam itu sangat mempengaruhi politik teritorialisasi secara kental di Aceh, yang membuat kabupaten/kota dibentuk atas garis politik identitas subetnik. Demikian juga dengan representasi politik dalam jabatan-jabatan publik sedikit-banyak menggunakan preferensi politik identitas.[11]

Konflik panjang dan telah melahirkan begitu banyak derita, telah membuat Aceh porak-poranda dalam berbagai sektor, ekonomi maupun politik. Secara politik telah mengakibatkan hilangnya kondisi kondusif di Aceh dan hancurnya rasa saling percaya dengan pemerintah pusat. Klimaksnya pada awal tahun 2000 dengan mulai memudarnya semangat kebangsaan Indonesia dan mulai masifnya semangat ke-Acehan dalam bentuk Negara bangsa.[12]

Jika dihubungkan dengan partai politik, seharusnya partai politik Islam dapat berkembang dengan pesat dan memperoleh simpati yang tinggi di daerah Aceh, dikarenakan orang Aceh yang fanatik terhadap Islam. Partai Islam seharusnya dapat memaksimalkan perolehan suara dalam pemilihan umum di daerah seperti Aceh. Namun, elektabilitas partai politik berlandaskan Islam agaknya tidak seperti itu, suara partai Islam sangat sedikit, malah didominasi oleh partai lokal yang tidak berembelkan Islam.[13]

Rata-rata kabupaten memenangkan bupati dari Partai Aceh, sangat sedikit yang memenangkan selain Partai Aceh. Bahkan pemerintahan tertinggi Provinsi pun dimenangi oleh Partai Aceh selama dua kali berturut-turut sejak ditanda tangannya MoU kesepahaman di Helsinki. Sekilas mungkin kita beranggapan bahwa menurunnya elektabilitas partai Islam di Aceh dikarenakan *euphoria* partai lokal yang merupakan hak istimewa daerah Aceh. Daerah lain tidak memiliki *euphoria* ini, sehingga masyarakat Aceh lebih memilih partai lokal dibanding partai nasional meskipun berembelkan Islam didalamnya. Namun, jika analisa ini benar, kenapa partai lokal yang berembelkan Islam juga menurun elektabilitasnya, seperti partai Partai Daulat Aceh. Semestinya partai-partai ini memiliki suara yang tinggi karena memiliki dua kelebihan, yaitu pertama status mereka sebagai partai lokal dan yang kedua status mereka yang sebagai partai Islam, namun tetap kedua hal tersebut tidak mendongkrak elektabilitas partai tersebut.[14]

Pada pemilukada tahun 2006, Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sukses merebut hati rakyat Aceh dengan hasil perolehan suara sebanyak 36 %, menyisihkan tujuh pasang calon gubernur lainnya. Irwandi-Nazar bagi pemilihnya merupakan representasi dari tokoh GAM yang dianggap mampu merubah kondisi masyarakat yang selama pemerintahan sebelumnya dianggap kurang mensejahterakan dan pro pemerintah RI. Rasa ke-Acehan yang begitu kuat melekat pada sosok Irwandi-Nazar menjadikannya

[10] Morina Oktavia, 2009. "Potensi Ulama dalam Mempertahankan Perdamaian Aceh", dalam *Merangkai Kata Damai.* Banda Aceh: Katahati Institute. Hlm. 93.

[11] Sutoro Eko. *Op.cit.* Hlm. 19.

[12] Thamren Ananda, 2009. "Perdamaian Aceh Bertopeng Sebelah", dalam *Merangkai Kata Damai.* Banda Aceh: Katahati Institute. Hlm. 66.

[13] "Faktor penyebab menurunnya elektabilitas partai Islam, khususnya di Aceh", dalam *http://qasehyalnis.blogspot.com/2013/02/faktor-penyebab-menurunnya.html* (akses: 25 Oktober 2013).

[14] *Ibid.*

terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur pertama dari jalur independen. Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar merupakan perwakilan GAM mengalahkan pasangan Humam Hamid-Hasbi Abdullah yang didukung oleh para *teungku dayah.*

Kondisi yang sama juga terjadi di Aceh Utara, dengan terpilihnya pasangan Ilyas Pase yang berpasangan dengan Syarifuddin sebagai Bupati dan wakil Bupati Aceh Utara mengalahkan Tarmizi Karim dan Amirullah yang dijagokan para *teungku dayah.* Tarmizi A. Karim merupakan salah satu kontestan politik yang awalnya diprediksi akan memenangkan Pilkada Aceh Utara dengan mudah, bahkan ia mengajak para *teungku dayah* berpose secara parade menyatakan dukungan kepadanya di atas panggung kampanye, namun dukungan teungku dayah yang vulgar terhadapnya berakhir dengan kekalahan telak sang kontestan.[15]

Perlawanan dan pembangkangan yang dilakukan oleh orang Aceh terhadap *teungku dayah* dalam pelbagai bentuknya itu merupakan salah satu indikasi yang merefleksikan betapa charisma legitimasi kekuasaan kharismatik mereka telah mengalami krisis. Krisis legitimasi *teungku dayah* tersebut mendorong terjadinya pergeseran eksistensi kepemimpinan mereka dalam masyarakat Aceh, dari pemimpin yang berpengaruh dalam beberapa bidang sekaligus (*polymorphic*) menjadi hanya berpengaruh pada satu bidang (*monomorphic*) saja yaitu agama (spiritual).[16]

Semangat baru masyarakat Aceh muncul pasca perdamaian di Aceh. Kerinduan tentang kebersamaan, keutuhan dan lebih dari semua itu adalah ketenangan, *ate beue saboh, pike beue saban* (*hati yang satu, piker yang sama*) merupakan semangat umum yang muncul tidak hanya dalam lagu, tetapi kolektif orang Aceh.[17]

Kelompok-kelompok dalam masyarakat memiliki identitas kolektif (*collective identities*), yang dalam banyak hal disebut juga identitas etnis. Identitas etnik ternyata melekat pada setiap penduduk di Inonesia tanpa terkecuali.[18] Identitas etnik, yang di dalamnya terkandung ciri yag berbeda dari etnis lain, seperti wilayah, bahasa, agama, sejarah asal-usul, dan sebagainya, menjadi peneguh dan pemberi legitimasi untuk mengekspresikan kepentingan ekonomi dan politik yang menjadi aspirasinya.[19]

Sesudah bérgulirnya reformasi sejak tahun 2008, dinamika politik di daerah memasuki era baru. Aktor, institusi, dan budaya lokal bermunculan kembali dan mulai memainkan peran di dalam politik lokal. Aktor-aktor lokal yang terorganisir dan memiliki simbol kultural lokal kembali berada di panggung politik.[20]

Setelah krisis moneter dan politik 1997 dan 1998, yang diikuti dengan periode yang diberi label "reformasi", banyak pengamat mengatakan Indonesia memasuki fase transisi dari pemerintahan otoriter menuju system pemerintahan yang lebih demokratis ketika masyarakat sipil memainkan peranan yang lebih menonjol. Terlebih lagi, transisi itu diiringi dengan

[15] Nirzalin Armia, op.cit., hlm. 45.

[16] *Ibid.*, hlm. 45.

[17] Irwan Abdullah, 2007. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 134

[18] Riwanto Tirtosudarmo, 2007. *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto.* Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hlm. xiii & xv

[19] *Ibid.*hlm. 15.

[20] Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed.), 2007. *Politik Lokal di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta. Hlm. x.

proses desentralisasi, yang membuahkan otonomi kedaerahan dan demokrasi.[21]

Etnisitas bisa memberi arti pembebasan bagi suatu suku yang menggunakan ideologi itu untuk membalik status politis mereka yang terpinggirkan.[22] Seperti diketahui, salah satu faktor yang turut menjadi akar permasalahan konflik di Aceh adalah peminggiran identitas kultural masyarakat Aceh yang berlangsung selama puluhan tahun. Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang memiliki identitas kultural yang sangat kuat, serta menjunjung adat mereka berdasarkan nilai-nilai Islam.[23]

Geertz menyatakan bahwa 'justru proses pembentukan Negara berkedaulatan rakyat itulah yang mendorong sentiment parokhialisme, komunalisme, rasialisme, karena semua itu memperkenalkan pada masyarakat sebuah "hadiah" baru yang berharga yang dapat diperebutkan dan sebuah kekuatan baru yang menakutkan yang harus dihadapi'. [24]

Naiknya pamor Partai Demokrat di Aceh sedikit banyak tidak bisa lepas dari citra pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang sekaligus Ketua Dewan Pembina dari partai berlambang bintang segi tiga tersebut. Terciptanya perjanjian perdamaian di Aceh yang ditorehkan di era pemerintahan SBY menjadi faktor penting yang cukup positif dalam memori pemilih Aceh.[25] Dalam pemilihan presiden yang berlangsung tanggal 8 Juli 2009, SBY yang berpasangan dengan Boediono menang mutlak di Provinsi Aceh dengan perolehan suara sebanyak 93,25%.[26]

Kedekatan hubungan politik muncul antara bagian-bagian dari GAM dan presiden yang saat ini berkuasa di Jakarta, SBY. Mayoritas masyarakat Aceh menyadari bahwa perdamaian yang berkelajutan di Aceh akan lebih aman di tangan pemerintahan SBY. Ketika SBY mengunjungi Aceh dua minggu sebelum pemilu, ribuan masyarakat berkumpul di stadion utama di Banda Aceh untuk menyambutnya. Masa itu dikerahkan oleh Sofyan Daud, mantan komandan GAM dan juga tokoh terkemuka. Partai Demokrat memenangkan sepuluh dari 69 kursi dalam dewan sementara Golkar mendapatkan 8 kursi.[27]

Kecenderungan naiknya pamor partai-partai nasionalis tidak lepas dari berubahnya orientasi politik pemilih di wilayah "Serambi Mekkah" ini. Hasil survei menyebutkan sebagian besar responden pemilih Aceh (47,2 %) menyatakan identitas keagamaan dari partai politik tidak menjadi hal yang memengaruhi afiliasi politik mereka di pemilu tingkat nasional.[28]

---

[21] *Ibid.*hlm. 1.

[22] *Ibid.*hlm. 28.

[23] Samsul Hadi, dkk., 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional.* Jakarta: *CIRes* FISIP UI – Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 48.

[24] Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed.), *op.cit.*, hlm. 31.

[25] Berebut Nasionalisme di Kancah Lokal, dalam http://otomotif.kompas.com/read/2009/04/03/09120621/direktori.html (akses: 25 Oktober 2013).

[26] Persentase Hasil Perhitungan Suara Sah Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2009 Menurut Provinsi, dalam http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=34&notab=5 (akses : 1 November 2013).

[27] "Pemilu Aceh: Sebuah Keniscayaan", dalam *Kabar Pemilu* Nomor 8, Juni 2009 http://tapol.org/sites/default/files/Pemilu_2009_Issue8.pdf (akses: 18 November 2013).

[28] Berebut Nasionalisme di Kancah Lokal, dalam http://otomotif.kompas.com/read/2009/04/03/09120621/direktori.html (akses: 25 Oktober 2013).

Dinamika Politik *Ureueng* Aceh

Sosok ulama atau *teungku* bagi masyarakat Aceh merupakan titik sentral atau bahkan menjadi sebuah oase sumber keagamaan masyarakatnya. Dari tingkat *gampong* hingga tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi lagi. Pada ranah politik praktis pun ulama pada masa lalu menjadi rujukan bagi sebagian masyarakatnya.

Ulama lebih dikenal sebagai pemimpin masyarakat non formal. Hal ini menunjukkan bahwa peranan para elit agama atau ulama dalam masyarakat cukup besar dan cukup disegani. Apa yang difatwakan oleh ulama, lebih didengar dan dipatuhi oleh masyarakat dari pada apa yang dikatakan oleh pemimpin formal. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa pemimpin-pemimpin formal tidak bisa dengan serta merta melepaskan diri dari dukungan para ulama. Sejak masa kerajaan, masa penjajahan hingga kemerdekaan para ulama mendampingi para pemimpin formal (umara) dalam melaksanakan pemerintahan, mulai dari unit pemerintahan tertinggi (kesultanan) hingga unit pemerintahan terkecil yang disebut *gampong*.[29]

Besarnya pengaruh para ulama atau tokoh agama ini dapat dilihat dari serentetan sejarah di Aceh. Cukup banyak literatur yang membicarakan peranan para ulama dalam masyarakat Aceh tempo dulu. Di antaranya laporan-laporan dari pihak Kolonial Belanda yang menceritakan tentang kiprah ulama Aceh, misalnya karya C. Snouck Hurgronje, yang kemudian dijadikan buku berjudul *De Atjehers*. Dari karya ini saja kita dapat melihat bahwa para alim ulama di Aceh cukup berperan dalam melawan Kolonial Belanda dan salah satu penyebab mengapa perang tersebut berlangsung cukup lama ialah karena peranan para ulama tersebut. Dengan simbol-simbol keagamaan seperti *hikayat perang sabil,* para ulama Aceh dapat membangkitkan semngat rakyat untuk tetap melawan Belanda.[30]

Berjalannya waktu dan konstelasi perpolitikan yang terjadi di Aceh pada akhirnya meruntuhkan marwah ulama. Disebutkan juga peran ulama menjadi lebih sempit ketika secara politis hanya tersalurkan dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP)[31], kemudian pada masa pertengahan orde baru ada sebagian ulama menjadi bagian dari partai penguasa orde baru membuat posisinya semakin terpinggirkan.

Pada era reformasi, berdirinya Himpinan Ulama Dayah Aceh (HUDA) pada September 1999 sebagai wadah ulama *dayah*, tidak membawa perubahan peran politik ulama. Demikian pula peran politik tidak terdongkrak dengan munculnya Partai Daulat Atjeh (PDA) yang berbasis *dayah* pada tahun 2000-an. Pada Pemilu Legislatif 2009, Partai Daulat Aceh (PDA) tidak mendapatkan dukungan yang suara yang memadai dari rakyat. Partai politik lokal bentukan ulama ini hanya mendapatkan 1 kursi di parlemen Aceh (DPRA) dari 69 yang diperebutkan, hingga menyebabkan partai ini terderadasi dan harus mengganti namanya menjadi Partai Damai Aceh (PDA) pada Pemilu 2014.[32]

Sebuah Riset Demos 2007-2008 menunjukkan, identitas etnis dan agama dalam konteks politik lokal semakin menguat. Hal ini dipengaruhi rezim Orde Baru yang membuat masyarakat terdiskriminasi dalam banyak hal. Menguatnya identitas ini ditunjukkan melalui indikator kecenderungan

[29] Agus Budi Wibowo,dkk. 2005. *Dinamika dan Peran Persatuan ulama Seluruh Aceh (PUSA) Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh.* Banda Aceh: BKSNT Banda Aceh. Hlm. 103.

[30] *Ibid.* hlm. 103-104.

[31] Jabbar Sabbil, 2014. "Peran Ulama dalam Politik Aceh" dalam Hasan Basri M. Nur (Ed.), *Parnas vs Parlok: Pertarungan Politik dalam Menguasai Aceh.* Banda Aceh: GAMNA. Hlm. 46.

[32] *Ibid.*

masyarakat dalam mengidentifikasi diri terhadap peristiwa-peristiwa politik lokal. Misalnya dalam pilkada orang memilih calon atas dasar kedekatan etnisitas atau putra daerah, dalam hal konflik yang sudah pecah maupun potensi itu karena etnisistas, dalam pemekaran wilayah setuju atau tidak setuju itu karena alasan etnisitas.[33]

Selain dari faktor agama, masyarakat Aceh juga digerakan oleh semangat etnisitas atau etno-nasionalisme Aceh yang begitu kental. Hal ini sebenarnya merupakan kewajaran dimana pada masa-masa sebelumnya hal-hal yang bersifat lokal sangat jarang tersentuh. Ciri keacehan yang sebelumnya tak pernah mendapat tempat kemudian menjadi sebuah *trend* pada masyarakat.

Dalam ranah politik, etno-nasionalisme Aceh ini diwujudkan dalam saluran Partai Aceh yang terbukti mampu mendulang suara mayoritas dalam Pemilu 2009 baik pada tingkatan provinsi maupun di kabupaten/kota. Terlebih di kabupaten atau kota dengan penduduk mayoritas beretnis Aceh, Partai Aceh berhasil mengungguli partai lainnya dengan suara mayoritas, seperti di Kabupaten Pidie, Partai Aceh memenangkan 34 dari 45 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Di Kabupaten Aceh Utara, PA mendapatkan 32 kursi dari 45 kursi yang ada dan di Aceh Timur, PA memenangkan 25 dari 35 kursi.[34]

[33] " Identitas Etnis dan Agama di Politik Indonesia Menguat", dalam http://nasional.kompas.com/read/2008/05/05/13533383/identitas.etnis.dan.agama.di.politik.indonesia.menguat. (akses: 12 Desember 2013)

Penutup

Melihat perkembangan politik *ureung* Aceh dari masa ke masa tampak pada garis besarnya terjadi pergeseran orientasi dari semula faktor agama dengan ulama sebagai tokohnya ke arah etno-nasionalis ke-Acehan yang kuat dalam menentukan pilihan berdemokrasinya. Partai lokal yang ada di Aceh mampu menjadi saluran yang kuat untuk menitipkan aspirasi politik *ureung* Aceh. Berkuasanya Partai Aceh dan juga banyak kepala daerah yang juga berasal dari Partai Aceh merupakan sebuah bukti menguatnya etnonasionalisme ke-Acehan *ureung* Aceh. Jargon kelokalannya setidaknya memberikan pilihan alternative ketika pilihan-pilihan lamanya tidak mampu mewujudkan keinginan *ureung* Aceh.

Partai Aceh sebagai salah satu representasi dari saluran politik *ureung* Aceh bisa diartikan bahwa ureung Aceh sedang mengalami euforia menguatnya identitas lokal dan semangat kedaerahannya atau menguatnya wacana mengenai kebanggaan lokalitas masyarakat Aceh.

[34] Agung Suryo Setyantoro, 2013. "Dinamika Politik di Aceh Utara (1970an – 2009)" dalam *Sejarah Demografi Kabupaten Aceh Utara*. Banda Aceh: BPNB Banda Aceh Press. Hlm. 229.

Agung Suryo Setyantoro, S.S. adalah Peneliti Pertama Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

KEBIASAAN MINUM KOPI DI WARUNG KOPI/CAFEE: DISKUSI BUDAYA DAN POLITIK MASYARAKAT ACEH

Oleh: Agus Budi Wibowo

Pendahuluan

Berbicara tentang Aceh, kita dapat mengidentifikasikan dengan beberapa kata, seperti Serambi Mekkah, Baiturrahman, Saman, Daerah Istimewa, Seudati, dan sebagainya. Irwan Abdullah[1], memberikan keberadaan *ureueng* Aceh dengan empat ikon, yaitu: Aceh dikenal sebagai tempat di mana agama dan adat menjadi dua pilar penting dalam penataan sosial, *ureueng* Aceh dikenal sebagai pemberani, *Ureueng* Aceh memiliki kepercayaan diri tinggi yang disebabkan oleh adanya kebanggaan sebagai *ureueng* Aceh, dan *ureueng* Aceh menjunjung tinggi nilai-nilai kolektif yang tercermin dari kebiasaan untuk berkumpul, saling kunjung, kenduri, fenomena warung kopi, serta upacara-upacara yang melibatkan banyak orang. Pada bagian lain, mushola (*meunasah)* dan juga kedai kopi (*keude kupi*) adalah dua pranata sosial dalam masyarakat Aceh yang sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Aceh itu sendiri. Keberadaan kedua pranata sosial ini menyebar di seluruh pelosok Aceh dan memiliki kesamaan fungsi untuk kegiatan sosialisasi dan interaksi di antara anggota masyarakat.

Terkait dengan pernyataan Irwan Abdullah di atas, terdapat pengalaman menarik, yaitu ketika pada tahun 1996, penulis menginjakkan kaki pertama di Banda Aceh terdapat hal berbeda dengan suasana di Jawa, baik di Jakarta atau di Yogyakarta. Dari hari ke hari, penulis mengetahui kehidupan keseharian masyarakat Aceh, khususnya yang ada di ibukota Provinsi Aceh ini. Dari banyak hasil amatan terhadap perilaku warga Banda Aceh, penulis amat tertarik terhadap kebiasaan minum kopi di warung/kedai yang dilakukan oleh masyarakat Aceh. Pada bagian lain, setelah penulis tinggal beberapa tahun di Aceh penulis mendengar bahwa terdapat sebuah ungkapan "belum ke Aceh, apabila belúm merasakan kopi ala Aceh di warung kopi". Oleh karena itu, menjadi sebuah "keharusan" apabila ada tamu-tamu dari luar Banda Aceh, penulis ajak untuk merasakan kopi dan minum kopi ala Aceh di beberapa warung/kedai kopi yang ada di kota ini, seperti warung kopi Abu Solong di Uleekareng. Kesan yang penulis tangkap dan pernyataan mereka sendiri bahwa kopi Aceh sangat berbeda dengan kopi dari daerah lain di Indonesia dan minum kopi di Aceh sungguh amat mengasyikkan.[2] Kasus di bawah ini memberi gambaran bagaimana nikmatnya minum kopi di Aceh seperti yang penulis kutip dari sebuah surat kabar terkemuka di Banda Aceh sebagai berikut,

> "Cerita tentang kenikmatan kopi di Aceh memang menggoda siapa saja. Setiap tamu yang berkunjung ke Aceh tak peduli dia penikmat kopi atau bukan seakan wajib mencoba kopi yang cita rasanya kerap disebut salah satu terbaik di dunia. Tak terkecuali dengan Akbar Tanjung, politisi senior Partai Golkar nyaris tidak

[1] Irwan Abdullah. 2007. *Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

[2] Agus Budi Wibowo."Cofee Morning Masyarakat Aceh". *Serambi Indonesia tanggal* 27 Juni 1996. Hlm. 4.

melewatkan kunjungannya ke Aceh untuk menikmati kopi. Seperi pada sabtu siang (3/3) Akbar yang ditemani sejumlah petinggi Partai Golkar Aceh, seperti Sulaiman Abda, Yusuf Ishak, T. Amirulzahri (ketua AMPG) dan Marzuki Daud (anggota DPR RI) menyisihkan waktunya untuk menikmati kopi di warung Cut Zen Beurawe. Datang dengan setelan kemeja putih dipadu dengan celana biru tua, pria berkulit putih yang memakai kacamata ini tidak risih untuk bergabung dengan para pengunjung lain di warung itu, ia memilih meja keramik bundar di salah satu sudut warung. Dalam hitungan menit, segelas kopi panas sudah ada di depannya. Akbar terlihat sangat menikmati asap beraroma kopi yang menyembur saat mengaduk kopi di gelasnya. Sesendok kopi pun ia cicipi. Aromanya begitu menyengat. Ini benar-benar beda, saya tergoda kopi ini," ujar Akbar. Sesaat kemudian, ia meraih kacang goring yang juga produk Beurawe. Mantan ketua PB HMI yang juga mantan ketua umum DPP Partai Golkar dan mantan ketua DPR RI ini seakan tidak sungkan lagi mengikuti kebiasaan di warung tersebut. Tak lama kemudian suasana di warung Cut Zen yang hanya berjarak puluhan meter dari Hermes Mall Beurawe semakin meriah Bupati Pidie Jaya M. Gade Salam dan Mukhlis Muchktar (politisi dari Partai Hanura) juga ikut bergabung di meja Bundar bersama Akbar Tanjung, Sulaiman Abda, dan lainnya. Pujian Akbar Tanjung tentang cita rasa kopi di warung itu, bukan sekedar basa basi. Buktinya, ia meminta tambahan satu gelas kopi lagi pada pelayan warung. "Tolong tambah satu gelas lagi ya jangan pakai gula ya", pinta Akbar. Akbar mengaku sebagai penikmat kopi. Ia sudah mencicipi kopi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Tak lupa ia membawa semua kopi dari daerah itu sebagai oleh-oleh bagi anaknya yang membuka "Java Café" di Jakarta. Kopi Aceh, Sulawesi, dan Sidikalang (Sumut) memang lain rasanya dan memiliki aroma dan nikmat tersendiri. Anak saya juga akui kopi Aceh memang lain", puji Akbar."[3]

Dari gambaran kasus yang ditulis oleh Yusuf dan amatan penulis dan beberapa tulisan tersebut memberi kesan bahwa kebiasaan minum kopi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh. Tulisan ini membahas bagaimana sesungguhnya kebiasaan minum kopi di warung/cafee tersebut sebagai bagian dari kebudayaan dan politik masyarakat Aceh. Data yang dipergunakan dalam tulisan ini sebagian diambil dari hasil penelitian penulis[4] dan sebagian lagi merupakan data baru yang penulis peroleh dalam rangka penulisan artikel ini.

Konsep Politik dan Budaya

Apakah kebiasaan minum kopi bagian dari budaya dan perilaku politik masyarakat Aceh ? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut tentunya, kita harus mendefinisikan terlebih dulu tentang konsep budaya dan politik itu sendiri serta

[3]Yusuf, Suprijal. "Akbar Tanjung pun Tergoda Kopi Beurawe", *Serambi Indonesia* tanggal 6 Maret 2012, hlm. 4.

[4]Agus Budi Wibowo. "Kebiasaan Minum Kopi di Warung/cafee Kopi dalam Persepsi Masyarakat Aceh (Sebuah Interpretasi Antropologis)". *Laporan Penelitian.* (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2012).

berlangsung cukup lama. Kebiasaan itu dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, terutama di kawasan pelabuhan dan pusat perdagangan. Meski pada saat itu sangat mungkin menu dan minumannya bukan kopi, tetapi kebiasaan *nongkrong* dan *ngobrol* untuk "membunuh" waktu sudah berlangsung turun temurun. Lombard (2008) menulis bahwa Peter Mundy pada April 1637 dengan susah payah berhasil mencapai tempat berlabuh di Aceh. Peter Mundy memberitakan bahwa ada yang menjual telur penyu rebus. Warung-warung mereka masing-masing dipungut bea sekeping emas sebulan untuk orang kaya Sri Maharaja. Untuk sementara, catatan Peter Mundy pada April 1637 itu setidak-tidaknya bisa dijadikan dasar keberadaan sebuah ruang publik yang dikenal dengan warung (rumah makan) di wilayah Aceh.[10]

Pada bagian lain terdapat pendapat bahwa keberadaan dan kebiasaan makan minum di warung muncul setelah Belanda "mengajarkan" tradisi minum kopi. Belanda mempunyai peran penting dalam membudidayakan tanaman kopi di Indonesia. Mereka telah memperkenalkan tanaman Kopi Arabika (*coffea arabica L.*) di Pulau Jawa pada tahun 1699. Di Aceh, tepatnya di Dataran Tinggi Gayo Aceh Tengah, mereka mulai membangun perkebunan Kopi Arabika pada tahun 1924 di daerah Paya Tumpi. Kini, Dataran Tinggi Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah secara nasional menjadi kawasan tanaman Kopi Arabika terluas di Indonesia. Salah seorang informan, Rusdi Sufi yang merupakan sejawaran Aceh, mengatakan tentang keberadaan kebiasaan minum kopi sebagai berikut:

"sebenarnya masyarakat Aceh tidak mengenal kebiasaan minum kopi. Kebiasaan ini dibawa oleh Belanda ke daerah ini pada masa Gubernur Jenderal Swart (1908-1918). Ketika itu, Belanda sedang menjalankan politik pasifikasi.. Masyarakat Aceh banyak yang terserang penyakit diare. Setelah diselidiki hal ini disebabkan masyarakat terbiasa minum air yang tidak dimasak. Untuk mengatasinya, Belanda meminta masyarakat memasak air terlebih dahulu sebelum air diminum. Agar terasa lebih nikmat, maka kemudian ditambahkan kopi".[11]

Foto 1: Wanita Penjual Kopi Terkenal di Blang Rakal Jalan ke Gayo (Dok: Repro)

Kebiasaan ini terus berlanjut hingga kini, sehingga tidak mengherankan di Aceh banyak terdapat kedai-kedai kopi. Hal ini tidak terlepas dari Aceh sebagai penghasil kopi, seperti di daerah Aceh Tengah, Bener Meriah dan Aceh Jaya. yang merupakan produsen kopi terbaik di Indonesia. Terkenal dengan biji kopi Arabikanya, Aceh memberikan kontribusi sebesar 40% dari produksi kopi Indonesia.

[10]Di Aceh, Warung Kopi Sejatinya Rumah Aspirasi. http://politik.kompasiana.com/2011/05/19/di-aceh-warung-kopi-sejatinya-rumah-aspirasi/ diakses pada tanggal 14 Februari 2014

[11]Agus Budi Wibowo. *op.cit.*, hlm. 67-68.

Selain itu, teknik membuat secangkir kopi di kedai kopi di Aceh tidak ada duanya. Para pembuat/peracik kopi di sini tidak pernah pergi ke pelatihan khusus untuk belajar. Cara penyajian kopi di Aceh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Di sini, kopi diseduh melalui beberapa penyaringan sampai pada kekentalan yang diinginkan sehingga membuat kopi lebih harum, nikmat dan memiliki efek rasa yang kuat. Kopi yang disajikan di Aceh berbeda karena kopinya tidak dicampur dengan bahan-bahan lain seperti beras dan jagung. Campuran tersebut biasanya dapat membuat cita rasa asli dari kopi hilang. Nawawi, pemilik kedai kopi Jasa Ayah atau lebih dikenal dengan Solong Ulee Kareeng, Aceh Besar tetap menjaga keaslian kopinya. Itu sebabnya, tutur Nawawi, orang-orang yang datang ke kedainya merasa puas meminum kopi racikannya.Kata, Nawawi:

> "Dalam membuat kopi untuk diracik kita tidak pernah mencampur dengan apapun, seperti dengan jagung misalnya. Saya berharap kalau nggak ada campurannya kopinya jadi harum dan gurih sehingga rasanya kopinya benar-benar terasa. Kalau sudah begitu orang akan ketagihan minum kopi di sini".[12]

Bahkan ada pemilik kopi yang menyimpannya dalam waktu yang cukup lama sebelum siap dihidangkan. Agam Syarifuddin (42 tahun), mengatakan bahwa.

> "... biji kopi yang dipakai untuk dihidangkan berasal dari petani kopi di Aceh. Setelah dibeli, biji-biji kopi itu saya simpan terlebih dahulu. Agak cukup lama saya simpan... biasa sampai empat bulan. Kalau ditanya kenapa ? Agar kadar asamnya berkurang dan kalau sudah lama kadar airnya pun ikut berkurang. Apabila dirasa telah cukup waktu penyimpanannya, maka kopi tersebut disangrai dengan bara. Waktu yang diperlukan untuk penyangraian ini mencapai tiga jam".[13]

Kebiasaan minum kopi di Aceh sudah mengakar di masyarakat. Warung kopi tradisional di Aceh awalnya adalah minuman kopi yang direbus lalu menggunakan saringan saat hendak disajikan. Fasilitasnya tak lebih dari meja dan kursi. Warung kopi tradisional digolongkan sebagai generasi pertama. Generasi kedua adalah warung kopi yang dikembangkan dengan waralaba. Generasi ketiga adalah warung kopi yang memberi fasilitas tak hanya minuman dan makanan, tetapi juga musik, televisi satelit, dan akses internet.

Selain kopinya yang membuat ketagihan, keistimewaan lainnya justru terdapat pada suasana yang mampu membuat orang betah berlama-lama di sini. Para pengunjung yang datang ke warung kopi bukan hanya sekedar minum kopi lalu beranjak dari tempat duduknya dan pergi Secangkir kopi bisa menjadi teman untuk mengobrol berjam-jam. Jadi, minum kopi dan ngobrol beralama-lama bagaikan dua sisi pada sebuah mata uang. Di warung kopi ini segala sesuatu bisa diobrolkan. Mulai dari gosip murahan, kelakuan anggota DPR, bisnis, sampai perang di belahan dunia sana. Semuanya habis dikupas dengan berbagai sudut pandang. Terkait dengan hal ini T.A. Sakti menyebutnya bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ada dua "ketagihan" masyarakat Aceh yang pemenuhannya saling mendukung satu dengan lainnya. Ketagihan itu adalah suka masalah 'politik'

[12] *Ibid.*

[13] *Ibid.*

dan doyan minum kopi.[14] Selanjutnya, ia mengatakan sebagai berikut:

> "…. Pada umumnya, berita-berita aktual masih hangat tentang 'politik' dimuat dalam surat kabar harian yang beredar setiap pagi. Sementara itu, bagi pecandu kopi cenderung sependapat, minum kopi yang paling nikmat adalah di warung. "Kopi di rumah kurang lezat!", kata seorang suami di suatu-pagi kepada isterinya.Kedua kesukaan masyarakat Aceh itu 'dimonopoli' para pemilik warung kopi. Mereka sengaja berlangganan suratkabar harian untuk bahan bacaan "politik" para langganan warungnya. akhirnya, kedua hobi masyarakat Aceh yakni ketagihan berita politik dan kecanduan minum kopi terpenuhi di warungkopi. Tiada hari tanpa minum kopi di warung kopi. Dan bukanlah warung kopi sesungguhnya, bila tidak berlangganan surat kabar harian. Ini ciri khas warung kopi di Aceh, terkecuali warung-warung kopi di desa-desa terpencil…".

[14]T.A. Sakti. "Minum Kopi Sambil Baca Koran". http://tambeh.wordpress.com/ category/opini/ diakses tanggal 17 Februari 2014.

Foto 2: Cara meracik minuman kopi
(Dok: Agus Budi Wibowo)

Mayoritas masyarakat Aceh tetap saja merupakan "pembaca" surat kabar di warung kopi. Suasana warung kopi tempo dulu, juga tetap sama dengan saat sekarang, hampir-hampir tak ada kursi yang kosong sehingga orang-orang menunggu giliran untuk membaca koran. Bermodalkan uang seharga segelas kopi dan sepotong kue, mereka sabar menunggu kesempatan itu. Malah tidak jarang hanya berbekal uang separuh gelas kopi tanpa kue, yang di Aceh popular disebut 'kopan" (kopi pancung). Kalau malu menyebut "kopan" di depan khalayak, cukup dengan isyarat mengacungkan jari telunjuk dengan separuh ditutup ibu jari. Pemilik warung mengerti yang diminta pelanggannya adalah kopi pancung (setengah gelas). Isyarat lain adalah meletakkan tangan kanan dileher sambil bergaya "memotong leher".[15]

Setelah kopi diminum seteguk-dua, mulailah "diskusi", memperbincangkan berita-berita hangat. Topik-topik "perdebatan" yang paling hangat di setiap warung kopi biasanya

[15] *Ibid*

berbeda sesuai dengan kondisi saat/hari itu, apabila sedang musim piala dunia maka ia akan menjadi santapan yang hangat, pemilihan umum atau pilkada juga bisa menjadi bahan diskusi yang menarik ala warung kopi, tetapi masalah-masalah pembangunan juga bukan hal yang asing diperbincangkan. Setiap orang dapat mengajukan pemikirannya terhadap topik yang dimaksud dan kemudian peminum kopi yang lain akan menimpalinya

Foto 3: Suasana Ngopi di Warung kopi Solong, Uleekareeng (Dok: Agus Budi Wibowo)

Kedai kopi sebagai sarana *public sphere* (ruang publik) kemudian menjadi kajian kritis yang tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang merupakan gabungan antara tiga kepentingan utama, seperti yang diungkapkan pakar Komunikasi dari Jerman, Habermas, bahwa ada kepentingan pekerjaan, interaksi (komunikasi), dan juga kekuasaan dalam setiap peristiwa yang terjadi di ruang publik. Habermas dalam sebuah karyanya menggambarkan sebuah sejarah di Eropa abad pertengahan yang memunculkan sebuah gerakan sosial ketika orang-orang sering berdiskusi di cafe-cafe, makin menyadari pentingnya membangun opini publik, dan menyerukan berbagai kepentingan bersama mereka melalui berbagai diskusi dan perbincangan informal tadi. Fenomena ini tak jauh dari kondisi yang terjadi pada masyarakat Aceh pada akhir-akhir ini, sehingga mencermati keberadaan kedai kopi di Aceh akan memungkinkan melihat fenomena masyarakat Aceh saat ini dan di masa depan. Bukan tidak mungkin kita dapat mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat Aceh dengan lebih terbuka dan jujur di berbagai kedai kopi ini dibandingkan dengan pembicaraan aspirasi yang disampaikan di gedung DPR/DPRD.[16]

Sistem egaliter yang diterapkan di kedai kopi Aceh ini sangat menarik dan membawa konsekuensi yang timbul karena kondisi tersebut. Misalnya saja komunikasi antara pemangku pemerintahan dan masyarakat makin terbuka. Kalau saja ada pejabat Aceh dapat melakukan metode *blusukan* ala Jokowi, maka kebiasaan minum kopi dapat dipergunakan sebagai tempat untuk *blusukan* untuk bertemu, berkomunikas, dan berinteraksi dengan masyarakat. Warung kopi adalah tempat berkumpulnya atau nongkrongnya atau poskonya masyarakat Aceh. Tidak aneh juga bila masyarakat Aceh juga punya pameo, "Pasti ada di kedai kopi", bila hendak bertemu dengan relasi ataupun rekanan kerjanya yang tidak dapat ditemui di tempat kerja maupun di rumahnya

Terlebih bila kita amati lebih jauh, rata-rata kedai kopi ini buka pada pukul 06.00-24.00 WIB. Untuk kedai-kedai kopi yang sangat populer seperti kedai kopi Jasa Ayah-Solong dan juga Chek Yukee, yang keduanya di Banda Aceh, kita dapat melihat sebuah pemandangan yang spektakuler, yakni sejak pagi dibuku

[16]Media Massa, Komunikasi Politik dan Kedai Kopi di Aceh. https://lestarin.wordpress.com/2010/01/22/media-massa-komunikasi-politik-dan-kedai-kopi-di-aceh/ diakses tanggal 21 Februari 2014.

hingga tutup selalu penuh berisi orang, sulit mencari tempat kosong

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa proses interaksi di kedai kopi di Aceh, ternyata mengubah fungsi tempat minum kopi, dari sekadar warung kopi, menjadi sejenis ruang sosial. Bahkan pernah sebuah lembaga swadaya masyarakat dan beberapa pejabat di Aceh menggunakan sebuah warung kopi untuk membuat diskusi, dengan tajuk tertentu, yang dapat diikuti oleh siapa saja. Warung kopi menjadi tempat berinteraksi dan berkomunikasi antara semua lapisan masyarakat, masyarakat umum dan pejabat publik dengan beragam topik diskusi beragam dari sosial, budaya, ekonomi, dan terutama tentang politik.

Penutup

Kebiasaan minum kopi di warung bagi masyarakat Aceh bukanlah suatu yang lahir begitu saja, tetapi kebiasaan ini telah berlangsung lama dan diwariskan dari generasi ke generasi, terangkum didalamnya sistem gagasan/ide, sistem sosial, dan budaya dalam wujud benda sebagai wujud kebudayaan milik masyarakat Aceh. Namum demikian, kebiasaan minum kopi juga mempunyai dimensi yang luas sebagai sebuah ruang sosial, yang mana masyarakat dapat menggunakannnya sebagai tempat berkomunikasi dan berinteraksi dalam berbagai hal misalnya politik. Semestinya kebiasaan minum kopi dapat dimanfaat dalam kegiatan positif dalam rangka membangun opini publik tentang berbagai hal, seperti pembangunan. Apa yang terjadi di Aceh tidak jauh berbeda dengan kebiasaan minum kopi pada beberapa tempat lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri, seperti di Philipina yang digambarkan dalam artikel Antonio Lopez[17] (1995) *"Cofee shop culture: Days in the life of Manila's Gossip Mill"* dengan mengatakan bahwa warung kopi telah menjadi institusi sebagai tempat bagi orang yang membawa berita dan pembawa pikiran, sehingga dimungkinkan sebagai pembentuk opini publik dalam rangka untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama, seperti definisi politik yang dipaparkan pada bagian subkonsep politik dan budaya di atas.

[17] Mauriza, Sazli. "Warung Kopi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Aceh", *Skripsi* sarjana Jurusan Antropologi UGM Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1998), hlm. 10

Drs. Agus Budi Wibowo, M.Si. adalah Peneliti Utama Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

HEGEMONI BAHASA DALAM DUNIA POLITIK

Oleh: Teguh Santoso

Pendahuluan

Bahasa secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem tanda yang bersifat arbriter dan digunakan sebagai alat komunikasi.[1] Berdasarkan definisi tersebut, bahasa dapat dikategorikan ke dalam dua sistem tanda yaitu sistem lisan yang dikenal dengan ragam bahasa lisan dan sistem tulis yang dikenal dengan ragam bahasa tulis. Kedua ragam tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Namun, artikel ini tidak akan membahas kedua ragam tersebut secara mendetail.

Definisi bahasa seperti tertulis di awal artikel ini juga memuat fungsi hakiki bahasa yaitu sebagai alat komunikasi. Pada sisi inilah hal yang menarik yang akan dikupas dalam artikel singkat ini. Komunikasi sudah barang tentu sebagian besar menggunakan medium bahasa sebagai penyampai informasi. Komunikasi yang alamiah tentu saja tidak membutuhkan penggunaan bahasa yang berbusa-busa. Artinya, pada kadar komunikasi dengan bahasa yang membutuhkan tujuan sugestif (merayu, mengajak) pasti seorang komunikan akan mengeksplorasi bahasa melalui kemampuan verbalnya. Hal ini terutama apabila dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang sifatnya politis. Hal ini tampak pada momen-momen kampanye, apapun kampanyenya yang membutuhkan bahasa-bahasa yang sugestif dan terkadang muncul bahasa-bahasa agitatif atau menghasut.

Percaturan politik di Indonesia masih didominasi oleh mereka-mereka para tokoh politik yang memiliki tingkat kemampuan verbal yang relatif bagus. Hal itu dibuktikan oleh banyaknya para tokoh politik yang pandai bersilat lidah dalam setiap kasus yang menyangkut baik dirinya maupun partainya. Penggunaan hegemoni bahasa seperti ini akan sangat rentan merugikan masyarakat. Selain hegemoni bahasa, seringkali para politikus juga menggunakan dominasi bahasa yang tidak jauh lebih baik daripada hegemoni bahasa. Hegemoni bahasa dan dominasi bahasa inilah yang akan coba diangkat melalui artikel ini.

Hegemoni bahasa dan dominasi bahasa

Sejenak kita layangkan pikiran kita ke masa Orde Baru (Orba). Hampir tiga dekade Orde Baru menancapkan kekuatannya di Indonesia, salah satu sebabnya adalah hegemoni bahasa. Hegemoni adalah membunuh, tetapi seolah merangkul. Menampar tetapi seolah mengelus. Menginjak-injak tetapi seolah-olah memijati. Pendeknya, hegemoni adalah senyum drakula yang menyembunyikan taringnya. Penindas yang berbohong menjadi penolong. Sementara itu, dominasi adalah praktik kekuasaan yang "jujur", membunuh dengan menusuk langsung ke jantung, menampar terang-terangan, menginjak-injak dengan rasa sakit seketika. Dominasi adalah tertawanya drakula yang mempertontonkan taringnya. Penindas yang jujur yang mengaku sebagai penindas. Jika dominasi adalah otoritarianisme yang terang-terangan, hegemoni adalah otoritarianisme yang

[1] Dendy Sugono (editor), 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, hlmn. 88

berbaju demokrasi. Inilah fenomena yang ditunjukkan saat Orde Baru lalu.[2]

Adalah sebuah "prestasi yang luar biasa" bahwa Orba mampu bertahan sekian lama. Salah satu penyokongnya adalah terlambatnya kesadaran banyak orang tentang adanya praktik hegemoni itu. Akibatnya, banyak orang yang melawan hegemoni kekuasaan dengan cara-cara dominatif. Ketika penguasa membunuh diam-diam, penentangnya melawan dengan menghunus pisau terang-terangan dan di tempat terang benderang. Mereka yang melawan selalu terkambinghitamkan sebagai "musuh semua orang". Apabila hal itu kita tarik pada masa kekinian, fenomena tersebut sekarang berlaku untuk mereka-mereka yang dikategorikan sebagai teroris. Mestinya, hegemoni dilawankan dengan perlawanan hegemoni pula. Contoh nyata yakni ketika banyak kasus penghilangan nyawa atas tokoh-tokoh seperti sastrawan Wiji Thukul, pegiat hak asasi manusia Munir, hingga operasi menangkap Imam Samudera yang menjadi teroris. Nama-nama tersebut identik dengan perlawanan (baca: terbuka) yang lalu dibungkam oleh rezim yang berkuasa dan dihembuskan rumor seolah-olah mereka adalah penantang penguasa atau yang merongrong.

Berkhianat pada kata-kata

Pada konteks Orba, pengkhianatan pada kata-kata bahkan telah mengalami pelembagaan dengan diberi dasar-dasar justifikasi secara hukum. Dan pengkhianatan terhadap kata-kata yang telah terlembagakan ini kemudian telah diperlakukan sebagai salah satu senjata otoritarianisme. Setidaknya ada dua modus penggunaan kata-kata sebagai senjata otoritarianisme Orde Baru. *Pertama*, manipulasi dan eufemisme. Kata-kata dipakai sebagai bagian dari politik kebohongan. Pada masa Orde Baru (sekitar tahun 80-an), menteri energi selalu mengumumkan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Beberapa pekan setelah pengumuman itu, pemerintah tiba-tiba menaikkan harga BBM. Aparat keamanan menyatakan bahwa keadaan masyarakat, khususnya di kota-kota dalam keadaan aman terkendali. Tak lama kemudian terjadi kerusuhan besar. Menteri keuangan mengumumkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat. Akan tetapi, saat krisis global melanda, Indonesia tidak mampu menghadapi terpaan krisis tersebut. Ujung-ujungnya kita terpuruk dan tidak sanggup menghadapi perubahan tersebut.

Dalam bentuk yang lebih halus, modus manipulasi lewat kata-kata dilakukan melalui ragam eufemisme.[3] Eufemisme adalah gaya penggunaan bahasa yang digunakan untuk menyatakan maksud tatapi dengan pilihan kata yang berkonotasi positif, sopan, dan tidak vulgar. Hal-hal buruk dikaburkan sehingga tampak sebagai sesuatu yang tak terlampau buruk, bahkan berubah menjadi bagus. Kekasaran dipermak lewat kata-kata sehingga menjadi terasa lembut. Eufemisme bahkan begitu sukses dimassalkan sehingga tanpa kita sadari ia telah menjadi tiran yang ditanamkan dalam kepala kita. Beberapa data eufemisme yang dapat dikemukakan misalnya kata *diamankan* yang selalu merujuk pada tindakan aparat keamanan terhadap para aktivis politik. Sejatinya mereka yang diamankan tidak hanya sekadar diamankan tetapi ditangkap bahkan dipenjara. Saat akan menaikkan harga BBM, pemerintah selalu menggunakan pilihan kata *disesuaikan*. Padahal jelas bahwa harga

[2] Eep Saifulloh Fatah, "Otoritarianisme dan Distorsi Bahasa" dalam *Politik Bahasa*, 2011, Jakarta: Badan Bahasa, hlmn. 21

[3] Sudjatmoko, *Bahasa dan Transformasi Budaya*, Jakarta: Ghalia, 1996, hlmn. 37

BBM dinaikkan dari sekian rupiah menjadi sekian rupiah.

Kedua, melarikan diri dari pokok persoalan. Kata-kata dipakai untuk menjawab atau menenggelamkan kritik dan gugatan terhadap kekeliruan. Ketika orang dibuat pusing oleh kenaikan harga yang berlangsung secara terus-menerus, rezim bukannya melakukan stabilisasi harga melainkan menghapus kata *kenaikan harga* dengan mengganti menjadi kata *penyesuaian harga.* Secara logis, pertanyaan kita adalah disesuaikan dengan siapa dan dengan apa? Pada faktanya, harga-harga melambung dan naik terus. Mengapa tidak secara lugas diakui bahwa harga-harga barang naik? Ketika orang dicekam rasa takut karena tingginya ancaman penggarukan, rezim bukannya mengakhiri praktik represif itu tetapi malah mengubah kata menjadi *penertiban.* Praktik-praktik seperti itu masih sering kita jumpai pada saat sekarang ini.[4]

Memperlakukan kata-kata sebagai senjata bagi sistem otoritarian atau totalitarian tentu bukan tanpa risiko. Salah satu sumber bentuk kegagalan sistem komunis yang totalitarian adalah dipraktikkannya penyederhanaan berlebihan dan besar-besaran (Brzezinki, 1989).[5] Praktik ini disokong oleh proyek-proyek manipulasi makna, manipulasi melalui kata-kata, yang berpola dan sistemik. Lantaran itulah, komunis mengalami kemunduran dan kemudian hancur. Betapa ngerinya risiko atas sebuah pengkhianatan kata-kata sehingga sebuah sistem dapat hancur.

Setidaknya, sampai dengan saat ini Indonesia tidak sampai menanggung risiko seperti itu. Akan tetapi, pengkhianatan kata-kata (seperti ditunjukkan oleh Orde Baru) tetap menjadi sebuah ancaman yang harus diantisipasi bersama. Pengkhianatan atas kata-kata tentu saja akan berdampak pada sindrom yang menjangkiti masyarakat. Ia ibarat virus yang terus berkembang dan menyebar. Apabila pengkhianatan kata-kata tidak dihentikan, besar kemungkinan akan menjadi penyakit yang cukup kronis yaitu sindrom ketidakpercayaan pada kata-kata.

Saat Soeharto lengser karena gerakan reformasi, ia kemudian muncul di televisi, lengkap dengan wajah dan bahasa tubuh yang sepuh. Lalu ia mengatakan bahwa ia tak mempunyai uang sesen pun yang ia simpan di luar negeri. Dengan cepat kita mungkin akan terkekeh atau mengulum senyum dan memandangi wajah tua itu seraya bergumam: kebohongan macam apalagi yang sedang ditebarkan. Senada dengan kasus yang menjerat mantan Ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Pada kasus Hambalang, ia pernah sesumbar apabila dirinya menerima satu rupiah pun uang dari kasus Hambalang, dirinya sanggup digantung di Monas. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lalu menetapkan ia sebagai tersangka, tuntutan masyarakat atas pernyataan ia yang siap digantung di Monas menguat. Tapi apa lacur, karena pengkhianatan terhadap kata-kata, dengan mudahnya ia melontarkan pernyataan: itu kan menurut keyakinan saya, bahwa saya tidak bersalah. Inilah bentuk kebohongan-kebohongan yang dipertontonkan para politisi kita. Kondisi ini jelas akan semakin menumbuhkan rasa tidak percaya yang risikonya berimplikasi pada sikap apatis masyarakat dan bahkan membuat masyarakat cenderung akan mencari keadilan dengan caranya sendiri.

Sindrom ketidakpercayaan menghinggapi hampir setiap orang. Boleh jadi, banyak orang yang membaca berita koran setiap hari sambil tidak memercayai isinya. Kebanyakan orang menyambutnya

[4] *ibid*

[5] Zbigniew Brzezinski, *The Global Failure: The British and Death of Communication in The Twentieth Century*, 1989, hlmn 5

dengan ungkapan ketidakpercayaan. Ini adalah sebuah persoalan besar yang tidak saja layak diprihatinkan oleh semua pihak, tetapi juga dijadikan agenda masa depan. Pada pundak kita terbeban sebuah tugas sejarah untuk mengeluarkan bangsa ini dari sindrom ketidakpercayaan pada kata-kata. Dengan membangun karakter sistem politik yang kredibel, responsif, kompeten, dan representatif dengan karakter serupa, kita dapat keluar dari sindrom seperti itu dan tidak akan mengalami nasib atas risiko pengkhianatan atas kata-kata.

Perilaku berbahasa politikus

Tahun 2014 ini ada orang yang mengatakan sebagai tahun politik. Maklum, pada tahun ini kita mempunyai hajatan besar penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) baik untuk anggota DPR maupun DPRD di tingkat provinsi serta kabupaten/ kota. Setiap orang yang memiliki hak pilih boleh memilih wakil mereka untuk duduk di dalam parlemen sesuai dengan pilihan hati nuraninya. Yang menarik adalah mencermati isi kepala para kandidat atau calon anggota parlemen dari bahasanya saat berkampanye. Tentu saja bahasa yang dimaksud dalam konteks ini adalah janji politiknya. Jangan heran apabila angka golput alias tidak menggunakan hak pilih setiap tahun semakin meningkat. Hal ini karena pemilih berasumsi bahwa setiap kali ia menemukan "kepala yang kosong" dan tentu saja "janji yang kosong" dari calon anggota parlemen, ia tidak akan memilihnya.

Rakyat berhak tahu terlebih dahulu isi kepala dan menakar janji seorang calon pemimpin sebelum rakyat menentukan pilihannya. Rakyat tidak boleh dipaksa membeli kucing dalam karung. Pemimpin tidak berhak atas cek kosong dari rakyatnya. Oleh karena itu, calon pemimpin, calon wakil rakyat, dan lainnya harus memiliki kesediaan mengungkapkan gagasan-gagasannya di depan publik. Publik berhak menguji dan menilai kelayakan-kelayakan gagasannya itu sekaligus menjadi nakhoda bagi bangsanya. Seorang pemimpin hadir bukan untuk terlihat sakral dan membuat bulu kuduk orang berdiri. Pemimpin harus efektif untuk proyek mensejahterakan rakyat, bukan untuk membodohi masyarakat.

Kampanye merupakan waktu yang paling ideal bagi rakyat menakar dan mengetahui isi kepala para calon wakil rakyat. Masa ini sangat dominan penggunaan bahasa yang berkarakteristik sugestif (mengajak). Setiap calon pemimpin maupun calon wakil rakyat akan menampilkan dirinya sebaik mungkin. Mungkin tidak setiap calon memiliki kemampuan verbal yang bagus. Oleh karena itu, ia akan melakukan hal itu melalui medium tulisan seperti spanduk, poster, baliho, dan lain-lain.

Linguistik atau ilmu bahasa mengenal teori identifikasi.[6] Teori identifikasi ini sangat kentara saat sebuah kampanye politik sedang digelar. Pada hakikatnya, teknik identifikasi ialah si calon pemimpin atau calon wakil rakyat akan mengidentikkan dirinya seperti rakyat kebanyakan. Mereka akan berperilaku sebagaimana umumnya masyarakat awam. Tak ayal pada masa kampanye banyak orang calon pemimpin melakukan kegiatan yang fenomenal dikenal dengan istilah "blusukan". Entah aktivitas itu dilakukan sungguh-sungguh, entah hanya sekadar memuaskan konstituen seolah ia juga merasakan apa yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Segala jurus akan diupayakan oleh para calon pemimpin atau calon wakil rakyat guna menggaet simpati rakyat.

[6] Soepomo Poedjosoedarmo, *Pengantar Sosiolinguistik*, 1988. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlmn.14

Alternatif lain guna melihat isi kepala dan janjinya adalah debat.[7] Kemampuan berbahasa seorang calon pemimpin atau calon wakil rakyat dapat diukur melalui hal ini. Sayangnya, dalam masyarakat masih terjadi perbedaan pandangan mengenai norma berdebat. Sebagian mengatakan bahwa hal itu tidak sesuai dengan adat ketimuran. Adat ketimuran selalu menjaga semuanya sesaui dengan harmoni, sehingga debat lalu dianggap sesuatu yang tabu karena debat berpotensi mengorek aib atau menjatuhkan seseorang. Tak pelak ada salah satu calon presiden saat Pemilu 1994 lalu menolak menghadiri acara debat calon presiden.

Kalangan akademis sebagian besar sangat mengharapkan acara debat sebagai ajang untuk mengungkapkan sekaligus mendiskusikan gagasan-gagasan para calon pemimpin atau calon wakil rakyat.[8] Bagaimana mungkin rakyat akan dapat membuat pilihan rasional atas para calon pemimpin mereka apabila para calon pemimpin merasa gerah dan alergi dengan pemaparan gagasan mereka melalui ajang debat. Dengan sistem pemaparan yang terbuka akan terbentuk apa yang selama ini diidam-idamkan sebagai daulat rakyat dan bukan daulat raja.

Penutup

Hegemoni bahasa pada dasarnya banyak dilakukan oleh siapapun, termasuk dalam dunia politik. Hegemoni tersebut terjadi karena kesadaran pengguna bahasa untuk tidak melakukan "perlawanan" atas hegemoni itu sendiri. Ada beberapa fakta yang dapat diungkap berkaitan dengan hegemoni bahasa supaya hal itu menjadi pelajaran bersama. *Pertama*, kebohongan yang telah diberi kerangka sistemik yang cukup kuat oleh rekayasa politik, seperti masa Orde Baru. Kebohongan tersebut dapat dikatakan kebohongan sistemik yang telah sengaja dilakukan oleh penguasa rezim melanggengkan kekuasaan. Kebohongan tersebut dilakukan dengan menutupi hakikat kejujuran melalui kata-kata yang dipakai sebagai alat hipnotis masyarakat.

Kedua, pembudayaan kebohongan telah terinternalisasi sebagai bagian dari perilaku pejabat pada umumnya. Seorang pejabat rasa-rasanya menjadi tidak sah kalau ia tidak berbohong, walaupun jelas-jelas kalau hal itu ia lakukan, sangat besar dosa dan kesalahannya. Sangat sedikit pejabat kita termasuk para politisi kita yang menjadikan kejujuran sebagai landasan filosofis pokok dalam mereka bertindak. Celakanya, perilaku berbohong pejabat ini sekarang seolah menjadi penyakit yang menjangkiti masyarakat kita. Oleh karena itu, bagi sebagaian orang hidup di Indonesia harga sebuah kejujuran sangatlah mahal. Tampaknya hal itu pun semakin jauh kita temukan. Beberapa fakta mengejutkan sering kita dengar berkaitan dengan produk-produk makanan. Kita mengenal bahan makanan yang dicampur bahan kimia berbahaya. Hal ini merupakan bentuk perilaku manusia yang tidak jujur.

Ketiga, masyarakat telah memiliki keakraban dengan kebohongan. Masyarakat lebih mengenaskan lagi, hampir-hampir tidak lagi mempercayai berita-berita di media massa. Sindrom ketidakpercayaan terhadap media massa lama-kelamaan bukan lagi sekadar sindrom tetapi telah menjadi kebiasaan. Kebohongan telanjur diakrabi bukan sebagai penyakit, tetapi sebagai keharusan rutin sehari-hari. Sungguh keadaan yang membuat hati kita miris.

Semoga dengan budaya politik yang santun, bermartabat, dan tidak berbohong akan menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi. Begitu pentingnya

[7] *Op cit* Pengantar Sosiolinguistik, hlmn.18

[8] Majalah *Tempo*, 9—15 Juli 2012, hlmn. 38

bahasa dalam komunikasi termasuk komunikasi politik, tak mengherankan apabila beberapa kandidat ataupun partai politik beramai-ramai memakai jasa konsultan bahasa guna penyampaian programnya ke masyarakat. Kondisi tersebut sah dan wajar adanya apabila diiringi dengan kejujuran. Kejujuran berkomunikasi akan membuat masyarakat memiliki pilihan yang rasional terhadap siapa yang layak untuk menjadi pemimpinnya dan wakilnya di parlemen.

Teguh Santoso, S.S., M.Hum. adalah Peneliti Muda Pada Balai Bahasa Banda Aceh

Kepemimpinan dalam Masyarakat Aceh

Oleh: Sudirman

Pendahuluan

Sebuah *hadih maja* menyebutkan: *Hana di gob na di geutanyoe, saboh nanggroe dua raja* (maksudnya, hanya di tempat kita sajalah sebuah negeri diperintah oleh dua orang raja). Pada masa lalu yang dimaksud dua "raja" adalah *uleebalang* dan ulama atau sultan dan ulama. Kepatuhan masyarakat kepada kedua "penguasa" tersebut menunjukkan adanya sifat keharmonisan dalam masyarakat Aceh. Dengan keadaan seperti itulah kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara baik. Bertahannya hubungan yang harmonis itu dalam masyarakat dimungkinkan oleh kokohnya penerimaan terhadap keharmonisan tersebut. Kepemimpinan seperti ini merupakan sistem yang unik. Oleh karena itu, dalam artikel ini dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan kearifan budaya Aceh dalam sistem kepemimpinan.

Faktor Kepemimpinan

Dalam masyarakat yang bermata pencaharian bertani, tanah merupakan unsur yang penting dalam kehidupannya. Tanah adalah sumber kehidupan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani.[1] Masyarakat memandang kepemilikan tanah sebagai unsur yang menentukan status seseorang. Berdasarkan kepemilikan tanah, di Aceh dikenal dua macam golongan petani, yaitu golongan pemilik tanah (*ureueng po tanoh*) dan golongan penggarap (*ureueng mawah*).

Akibat pengaruh ekonomi keuangan, lalu lintas ekonomi tidak saja dalam proses jual beli di pasar dan di kedai-kedai, tetapi juga berpengaruh dalam kegiatan produksi pertanian. Jenis tanaman yang diusahakan di kebun-kebun pada umumnya berupa jenis tanaman perdagangan. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwa masyarakat tani sudah memasuki rumah tangga keuangan. Ekonomi keuangan mempengaruhi pula pengusahaan ternak yang diselenggarakan secara tradisional di kebun-kebun. Selain terhadap jenis produksi, pengaruh ekonomi keuangan menjalar pula ke sistem upah buruh pertanian, seperti sistem upah membajak. Lebih jauh ekonomi keuangan telah mempengaruhi cara penyelenggaraan upacara keagamaan yang dananya pada mulanya ditanggung oleh beberapa orang kaya, kemudian berubah menjadi tanggungan semua keluarga dalam *gampong*.[2]

Ekonomi keuangan telah mempengaruhi pula keadaan rumah penduduk. Pada mulanya, kompleks rumah penduduk berpusat pada satu sumur. Para keluarga biasanya berhimpun dalam apa yang disebut *syedara lingka*. Pada *gampong* yang relatif terbuka, setiap rumah tangga membuat sumur sendiri dan sudah mulai memagari pekarangannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila dalam masyarakat, uang telah menentukan status seseorang, di samping pemilikan tanah yang merupakan sumber utama masyarakat pedesaan. Dari unsur tanah dan uang, lahirlah penghargaan terhadap orang-orang dalam masyarakat atas dasar

[1] John H. Kolb dan Edmund de S. Brunner. 1952. *A Study of Rural Siciety*. Cambridge, Massachaussets: The Riverside Press. Hlm. 87.

[2] Alfian (ed.). 1977. *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 83.

kekayaan. Keadaan yang demikian sama halnya dengan di Jawa[3] atau di tempat-tempat lainnya di Asia Tenggara.[4]

Muncullah stratifikasi sosial yang terdiri atas golongan kaya (*ureueng kaya*), golongan cukup (*ureueng sep pajoh*), dan golongan miskin (*ureueng gasin*). Stuktur sosial semacam ini adalah struktur yang diterima oleh masyarakat sebagai kodrat dari Ilahi.[5] Penerimaan struktur sosial sebagai kodrat menunjukkan kuatnya pengaruh ajaran keagamaan masyarakat.[6] Demikian kuatnya pengaruh keagamaan terhadap corak kehidupan masyarakat sehingga unsur agama bukan saja menjadi dasar ikatan pengelompokan, tetapi juga merupakan salah satu unsur yang menetapkan penghargaan terhadap seseorang dalam masyarakat. Panggilan *teungku*, selain merupakan panggilan orang luar terhadap orang Aceh pada umumnya, dalam masyarakat Aceh sendiri merupakan gelar kehormatan bagi seseorang karena pengetahuan keagamaan yang dimilikinya.

Pemimpin sebagai tumpuan masyarakat adalah orang yang mempunyai kelebihan dari orang-orang lain. Oleh karena itu, pemimpin dari berbagai bidang dalam masyarakat pada umumnya berasal dari golongan bangsawan, golongan ulama, dan kelas-kelas ekonomi yang lebih banyak mengenyam pendidikan.

Struktur Kepemimpinan di Aceh

Khasanah lama masyarakat Aceh menampilkan agama dan adat sebagai dua unsur yang dominan dalam mengendalikan gerak hidupnya. Sultan dan *uleebalang* merupakan dua pilar utama pendukung kehidupan adat. Sultan dan *uleebalang* menjadi simbol keberadaan dan peranan adat dalam masyarakat Aceh. Di pihak lain, dalam lapisan yang sama, ulama muncul sebagai pilar utama pendukung serta memperjuangkan keberadaan dan peranan agama.

Kedudukan sultan (pemimpin) mendapat legitimasi dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam yang dipahami masyarakat, seorang penguasa adalah "wakil" Tuhan di bumi.[7] Hal itu dapat dilihat, misalnya, dalam *sarakata-sarakata* kesultanan yang menyebutkan sultan bergelar *zhillullah fil alam* (bayang-bayang Allah di alam semesta). *Cap sikureueng* (cap sembilan) yang dikenal sebagai cap halilintar (stempel kesultanan Aceh) memberikan kesan kepada rakyat secara mistik bahwa sultan berkuasa atas mandat dari Tuhan.[8] Sultan Ali Riayat Syah (1585--1604) disebut *Sayyidil Mukammal* ('Tuanku Yang Sempurna'), seperti halnya dengan gelar *Al Insanul Kamil* ('manusia sempurna') yang diperuntukkan pada Nabi Muhammad. Dengan demikian, sebagaimana masyarakat Asia Tenggara pada umumnya, masyarakat Aceh juga mengenal "pemujaan" pada sultannya.[9] Oleh karena itu, seorang sultan secara ideal harus memenuhi syarat-syarat yang ideal pula. Ia harus merdeka, dewasa, mengetahui hukum dan adat, adil, cakap

[3]Robert Jay. 1969. *Javanese Villagers (Social Relation ini Rural Modjokuto)*. Cambridge, Massachausets: London, The MIT Press. Hlm. 262.

[4] Syed Hussein Allatas. 1973.*Modernization in South East Asia*. London, New York, Melbourne: Oxford University Press. Hlm. 161.

[5]Sartono Kartodirdjo. "Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia". Dalam *Bulletin Yayasan Perpustakaan Nasional* (Berita Ilmu-Ilmu Sosial dan Kebudayaan). No. 1 Tahun 1974. Hlm. 9.

[6]J.H. Boeke. 1971. Batas-Batas Msyarakat Pedesaan Indonesia. Seri terjemahan LIPI. Jakarta: Bhratara. Hlm. 23.

[7] L.E. Brakel. 1981. "Negara dan Kenegaraan Aceh". Dalam *Dari Sini Ia Bersemi*. Banda Aceh: Panitia Penyelenggara MTQ Tingkat Nasional ke-12. Hlm. 241.

[8] G.P. Rouffaer. 1980. *Cap Sikureung*. Terjemahan Rusdi Sufi. Banda Aceh: Museum Aceh. Hlm. 31.

[9] *Ibid.*, hlm. 242.

memerintah, dan cerdas lagi bijaksana.[10] Syarat-syarat itu seharusnya dipenuhi agar sultan sesuai dengan predikat sebagai *zhillullah fil alam.*

Dipenuhinya unsur-unsur di atas tidak otomatis menetapkan seseorang menjadi pemimpin. Masih ada syarat legitimasi kekuasaan yang begitu menentukan, yakni integritas pribadi yang didasarkan kepada pengalamannya yang biasa disebut dengan istilah *tuha* (ketuhaannya). Ketuaan seseorang dilukiskan dalam empat karakteristik, yaitu *tuha-tuho* ('mengerti adat dan agama sekedarnya'), *tuha turi droe* ('mengerti tentang dirinya bahwa ia sudah matang kepribadiannya'), *tuha peproe* ('mempunyai kecakapan sebagai juru damai'), dan *tuha gaseh keu agama ngon keu nanggroe* ('mencintai agama dan negerinya').[11]

Selain sultan sebagai pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan di Aceh pada zaman dahulu, susunan kepemimpinan selanjutnya, sebagai berikut.

Pertama, keuchik, sebagai kepala sebuah *gampong. Keuchik* dibantu oleh *tuha peuet* (tuha empat, maksudnya adalah empat orang yang berpengalaman di bidang adat) dan seorang imam salat rawatib. Setiap *gampong* memiliki sebuah bangunan keagamaan yang dinamakan *meunasah,* tempat anak laki-laki di atas umur enam tahun belajar dasar-dasar keimanan dan belajar mengaji Alquran. Di tempat ini mereka dididik dan diajar oleh guru agama (*imuem meunasah*) dan guru perempuan (*teungku inong*), biasanya istri dari *imuem meunasah.* Pada zaman dahulu, setiap anak wajib mengikuti pendidikan ini tanpa dipungut bayaran dan bagi sang guru, tugas mengajar dan mendidik adalah amal.[12]

Pihak yang berperan membentuk anggota masyarakat *gampong* terletak pada tiga pilar kepemimpinan, masing-masing diperankan oleh *keuchik, imuem meunasah,* dan *tuha peuet.* Peran *keuchik* mengasuh anggota komunitasnya mengenai masalah-masalah adat, masalah sosial, dan mengatur administrasi pemerintahan tingkat *gampong.* Peran *imuem meunasah* seperti sudah disebutkan, yaitu mengasuh, mengajar, membimbing perihal keagamaan, mulai dari mengajarkan anak-anak mengaji Alquran, menanamkan dasar-dasar ketauhidan, memimpin acara keagamaan pada bulan puasa, serta upacara-upacara keagamaan pada hari-hari besar Islam hingga membacakan doa dalam berbagai kenduri. Sebagian besar acara atau upacara keagamaan ini dilaksanakan di *meunasah.*

Tuha peuet adalah dewan orang tua yang mempunyai pengetahuan luas tentang adat dan agama. Dewan ini berperan memberikan nasihat kepada *keuchik* dan *imuem meunasah* menyangkut pelaksanaan tugas masing-masing. Dalam sistem politik tradisional komunitas tingkat *gampong,* anggota masyarakat atau orang kebanyakan menganggap *keuchik* sebagai "ayah *gampong*" dan *imuem meunasah* sebagai "ibu *gampong*".[13] Dengan status dan peranan semacam itu, jelaslah betapa berjalin-kelindannya peranan umara dan ulama dalam masyarakat Aceh.

Kedua, imuem mukim, memimpin badan federasi beberapa *gampong* yang disebut *mukim. Imuem mukim* dibantu oleh seorang *qadli.* Gabungan beberapa *gampong* menjadi komunitas yang lebih

[10] Mohammad Hoesein. 1970. *Adat Atjeh.* Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Hlm. 207.

[11] Alfian (ed.). *op.cit.* Hlm. 84.

[12] M. Junus Melalatoa. 2005. "Memahami Aceh Sebuah Perspektif Budaya". Dalam *Aceh Kembali ke Masa Depan.* Jakarta: IKJ Press. Hlm. 26.

[13] T. Ibrahim Alfian. 1987. *Perang di Jalan Allah.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 42.

besar bernama *mukim,* belakangan disebut kemukiman. Komunitas ini juga berorientasi keagamaan yang berpusat pada masjid. *Imuem mukim* berperan menangani perihal yang berkaitan dengan adat dan masalah sosial lainnya, sedangkan yang satunya lagi mengatur dan mengasuh anggota masyarakatnya dalam lapangan keagamaan termasuk pendidikan agama yang dilaksanakan di masjid. Pendidikan yang dilaksanakan di masjid merupakan kelanjutan dari apa yang telah diajarkan di *meunasah.*

Ketiga, uleebalang, memimpin daerah *uleebalang,* daerah yang terdiri atas beberapa *mukim. Uleebalang* dibantu oleh seorang *qadli.* Pada masa lalu beberapa *mukim* bergabung menjadi satu *nanggroe* yang merupakan wilayah otonom dan berada di bawah kekuasaan *uleebalang.* Dalam menjalankan pemerintahan, *uleebalang* didampingi oleh *tuha peuet.* Dewan orang tua ini ditambah lagi dengan seorang *kadi,* yaitu kepala urusan agama. Semua hal yang penting, baik yang menyangkut urusan pemerintahan, peradilan atau pertahanan harus dibicarakan oleh "dewan" sebelum diambil sesuatu keputusan. Tiada seorang pun penguasa yang berani melaksanakan suatu tindakan penting yang bertentangan dengan pendapat atau kemufakatan "dewan".[14] Pada masa sesudah kemerdekaan, komunitas *nanggroe* berganti nama menjadi kecamatan.

Keempat, panglima sagoe, khusus di Aceh Besar dibentuk tiga *sagi* untuk mengkoordinir daerah-daerah *uleebalang* yang tergabung di dalamnya. Daerah tersebut, sebagai berikut. (1) *Sagoe Teungoh Lhee Ploh,* teridiri atas 25 mukim, dipimpin oleh *panglima sagi* yang bergelar *Qadli Malikul Alam Seri Setia Ulama* dan dibantu oleh *qadli* panglima *sagoe.* (2) *Sagoe Dua Ploh Nam,* terdiri atas 26 mukim, dipimpim oleh *panglima sagi* yang bergelar *Seri Imam Muda 'Oh* dan dibantu oleh seorang *qadli* panglima *sagoe.* (3) *Sagoe Dua Ploh Dua,* terdiri atas 22 mukim, dipimpim oleh panglima *sagoe* yang bergelar *Panglima Polem Seri Muda Perkasa* dan dibantu oleh seorang *qadli panglima sagoe.*[15]

Karakteristik Kepemimpinan Aceh

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kepemimpinan digunakan untuk mengarahkan individu-individu pada tujuán kehidupan dalam masyarakat. Suatu masyarakat yang dijalankan tanpa kepemimpinan akan mengalami kelemahan dan kesulitan untuk mencapai tujuan. Kesulitan tersebut timbul karena tidak ada pihak yang menghubungkan tujuan individu dalam masyarakat. Bukhari al-Jauhari mengemukakan dalam kitabnya (*Tajussalatin*)[16] tentang sistem kenegaraan yang ideal dan peranan seorang raja yang adil dan benar. Orang yang tidak adil, apalagi dia seorang raja, akan menerima hukuman berat di dunia dan akhirat. Sebaliknya, raja yang baik dan adil, akan menerima pahala dan tempat di surga

[14] A.J. Vleer. 1978. "Kedudukan Tuha Peuet". Dalam *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan.* Terjemahan Aboe Bakar. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Hlm. 2-3.

[15] K.F.H. Van Langen,. 1986. *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan.* Terjemahan Aboe Bakar. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Hlm. 14.

[16] Kitab *Tajussalatin* berisi pedoman bagaimana seharusnya perilaku dan kewajiban segala raja, menteri, hulubalang, dan rakyat dalam kehidupan bernegara menurut ajaran Islam. Peneliti Sastra Melayu Klasik, Dr. T. Iskandar, menyebutkan bahwa Bukhari al-Jauhari adalah seorang penulis Melayu keturunan Persia yang nenek moyangnya berasal dari Bukhara. Dia datang ke negeri Melayu sebagai saudagar batu permata. Kitab Tajussalatin selesai ditulis pada tahun 1603, ketika Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Sayyidil al-Mukammil (1588-1604).

karena ia menjalankan sesuatu berdasarkan hukum Allah dan Rasul-Nya.[17]

Bukhari al-Jauhari tidak hanya memberikan makna etis dan moral bagi keadilan, melainkan juga makna ontologis. Raja yang baik adalah seorang *ulil albab* yang menggunakan akal pikiran dengan baik dalam menjalankan segala perbuatan dan pekerjaannya, khususnya dalam pemerintahan. Ia menjelaskan pula tentang kriteria *ulil albab* yang seharunya dimiliki oleh pemimpin, *pertama*, bersikap baik terhadap orang yang berbuat jahat, lalu menggembirakan hatinya dan memaafkannya apabila orang itu telah meminta maaf dan bertaubat. *Kedua*, bersikap rendah hati terhadap orang yang berkedudukan lebih rendah dan menghormati orang yang bermartabat, pandai, dan orang berilmu. *Ketiga*, mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan cekatan pekerjaan yang baik dan perbuatan yang terpuji. *Keempat*, membenci perbuatan jahat, fitnah, dan berita yang belum jelas kebenarannya. *Kelima*, senantiasa menyebut nama Allah, meminta ampun dan petunjuk kepada-Nya, serta selalu ingat akan kematian dan siksa kubur. *Keenam*, mengatakan sesuatu hanya yang benar-benar diketahui, serta sesuai dengan tempat dan waktu, yaitu arif dalam menyampaikan sesuatu.[18]

Karena itu, seorang raja atau pemimpin harus memenuhi syarat sebagai berikut. *Pertama*, *hifz* (memiliki ingatan yang kuat). *Kedua*, fahm (memiliki pemahaman yang benar terhadap berbagai perkara). *Ketiga*, *fikr* (tajam dan luas wawasan). *Keempat*, *iradat* (menghendaki kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan untuk seluruh lapisan masyarakat). *Kelima*, *nur* (menerangi negeri dengan cinta atau kasih sayang).[19]

Bukhari al-Jauhari menambahkan beberapa syarat lagi yang seharusnya dimiliki oleh seorang calon pemimpin, agar dapat memerintah negeri dengan adil dan benar. *Pertama*, seorang pemimpin harus dewasa dan matang dalam segala hal sehingga dapat membedakan yang baik dan buruk bagi diri, masyarakat, dan manusia pada umumnya. *Kedua*, seorang pemimpin hendaknya memiliki ilmu pengetahuan yang memadai berkenaan dengan masalah etika, pemerintahan, politik, dan agama. *Ketiga*, pembantu raja yang diangkat harus dewasa dan berilmu, serta menguasai bidang pekerjaannya. *Keempat*, mempunyai wajah yang baik dan menarik sehingga orang mencintainya, tidak cacat mental dan fisik. *Kelima*, dermawan, pemurah, tidak kikir dan bakhil. *Keenam*, pemimpin yang baik harus senantiasa ingat pada orang-orang yang berbuat baik dan membantu dia keluar dari kesukaran serta membalas kebaikan dengan kebaikan. *Ketujuh*, pemimpin yang baik harus tegas dan berani, terutama dalam menghadapi orang jahat dan negara lain yang mengancam kedaulatan negara. *Kedelapan*, tidak banyak makan dan tidur, tidak gemar bersenang-senang, dan berfoya-foya. Hal itu dapat membuat dia alpa dan lalai pada tugasnya sebagai pemimpin. *Kesembilan*, tidak senang bermain perempuan. *Kesepuluh*, seorang pemimpin yang dipilih sebaiknya dari kalangan lelaki yang memenuhi syarat dalam memimpin negara.[20]

Bukhari al-Jauhari membahas keharusan seorang pemimpin berbuat adil dalam segala hal. Dia mengutip Surat al-Nahl: 90, "sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan ihsan". Menurut Bukhari al-Jauhari, sikap adil ada

[17] Teuku Iskandar. 1996. *Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad.* Jakarta: LIBRA . Hlm. 378.

[18] Abdul Hadi W.M. 2005. Aceh dan Kesusastraan Melayu. Dalam Dalam *Aceh Kembali ke Masa Depan.* Jakarta: IKJ Press. Hlm. 218.

[19] *Ibid.* Hlm. 219.

[20] *Ibid.* Hlm. 220.

dalam perbuatan, perkataan, dan niat yang benar. Adapun ihsan mengandung makna adanya kebaikan dan kearifan dalam perbuatan, perkataan, dan pekerjaan. Pemimpin yang adil merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada masyarakat yang beriman. Adapun pemimpin yang zalim sering merupakan hukuman dan laknat yang diturunkan kepada masyarakat yang berbuat aniaya.[21]

Bukhari al-Jauhari juga menyebutkan tentang perkara yang menyebabkan sebuah kerajaan runtuh. *Pertama*, pemimpin tidak memperoleh informasi yang benar dan terperinci tentang keadaan negeri dan hanya menerima pendapat dari satu pihak atau golongan. *Kedua*, pemimpin melindungi orang jahat. *Ketiga*, pegawai raja senang menyampaikan berita bohong, menyebarkan fitnah, dan membuat intrik-intrik yang membuat timbulnya konflik.[22]

Ada beberapa hal menarik yang dapat diamati akhir-akhir ini dalam memandang karakteristik pribadi dan kemampuan yang diharapkan agar dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang dikehendaki adalah seorang yang beragama Islam dan harus dapat membaca Alquran dengan baik. Ini merupakan kecenderungan baru yang ingin dibudayakan dalam hal kepemimpinan. Dalam pemilihan pimpinan dan jabatan publik lainnya di Aceh, para calon diharuskan mengikuti test membaca Alquran. Selain itu, masyarakat cenderung menghendaki agar pemimpin adalah putra daerah. Dalam pemahaman masyarakat, putra daerahlah yang dapat memahami sistem sosial budaya masyarakat Aceh.[23] Selanjutnya, seorang pemimpin sebaiknya mempunyai tingkat pendidikan formal yang tinggi, berpandangan luas, dan konsisten. Di samping mempunyai integritas pribadi dan rasa humor yang tinggi. Seorang pemimpin yang mempunyai pandangan dan perilaku hidup pluralistik, merupakan salah satu karakteristik tipe pemimpin dan gaya kepemimpinan yang diinginkan.[24]

Penutup

Pada zaman dahulu, kepemimpinan di Aceh didasarkan pada teori genetik. Artinya, kepemimpinan harus selalu berasal dari kelompok atau keluarga tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. *Uleebalang* pada masa lalu adalah jabatan pimpinan daerah yang dibawa sejak lahir. Bandingkan, misalnya, dengan kedudukan atau peranan ulama yang mendapat pengakuan dari masyarakat. Kedudukan itu tidak dibawa lahir, tetapi diupayakan sedemikian rupa sehingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

Tipe pemimpin dan kepemimpinan sering ditentukan oleh karakteristik sistem sosial budaya dan kondisi sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, seorang pemimpin dari tipe bagaimana pun harus selalu bersedia merevisi teknik atau pendekatan bagaimana ia melakukan perannya dalam masyarakat. Apa yang disebut luwes dan fleksible adalah perilaku yang selalu dapat disesuaikan dengan perubahan makna dari suatu simbol atau perubahan sistem sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Sistem sosial budaya dan kondisi sosial budaya yang berkembang akan melahirkan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin dan gaya kepemimpinan tertentu. Gaya kepemimpinan selalu dapat

[21] *Ibid.*

[22] *Ibid.*

[23] Majalah mingguan *Modus Aceh* No. 22/TH.VI Minggu III, September 2009. Hlm. 20.

[24] Bahrein T. Sugihen. 2007. "Pemimpin dan Kepemimpinan". *Makalah* pada Acara Dialog Budaya di Banda Aceh 29-31 Desember. Hlm. 3.

disesuaikan dengan perkembangan sosial budaya masyarakat.

Agama dan adat sebagai dua unsur yang dominan dan mengendalikan gerak hidup masyarakat Aceh. Demikian pula dalam lapisan atas masyarakat tersebut, di satu pihak, sultan dan *uleebalang* merupakan dua pilar utama yang mendukung kehidupan adat. Sultan dan *uleebalang* bahkan menjadi simbol keberadaan dan peranan adat dalam masyarakat Aceh. Di pihak lain, dalam lapisan yang sama, ulama muncul sebagai pilar utama yang mendukung serta memperjuangkan keberadaan dan peranan agama. Ulama dan umara terjalin hubungan yang harmonis sehingga pemerintahan dapat berlangsung baik.

Sudirman, S.S., M.Hum. adalah Peneliti Madya Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

"INTUISI TAK TERBATAS" (MEMOTRET BUDAYA PROTES *FACEBOOK*, DALAM DINAMIKA POLITIK ACEH)

Oleh: Muhajir Al Fairusy

Pendahuluan

Pasca-penandatanganan perdamaian MoU Helsinki, antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (baca; GAM) tahun 2005, Aceh terus melaju pada kondisi yang (mungkin) kondusif-tanpa konflik lagi. GAM bertranformasi menjadi Komite Peralihan Aceh (baca; KPA), sekaligus ikut mendirikan partai lokal, sebagai buah dari kesepakatan perdamaian yang disepakati. Hegemoni GAM, dan konstruksi wacana dari jejak historis dan perjuangan selama 30 tahun lamanya, terus mendapat dukungan dari banyak rakyat Aceh, pada Pemilukada tahun 2006. Calon yang diusung oleh GAM (meskipun berwarna independen), berhasil merebut suara yang cukup signifikan.[1] Di parlemen, pada tahun 2009, kemunculan partai lokal (terutama partai bentukan GAM, yaitu Partai Aceh) pun, mampu menggeser partai-partai Nasional, yang pernah (lama) berkuasa di Aceh.

Namun, politik tak pernah ada yang berjalan lurus dan sepakat (tanpa kepentingan). Selama setengah dekade, sejak terpilihnya Irwandi Yusuf eks-aktifis GAM, yang juga anggota senior kelompok pro-kemerdekaan tersebut, situasi politik dalam tubuh GAM juga ikut berubah. Riak konflik mulai tercium, setelah terjadi usaha menggeser Irwandi ,oleh tetua kelompok perlawanan, untuk maju sebagai calon *incamben* pada Pemilukada selanjutnya. Konflik (meskipun tak separah yang diduga), menuai klimaksnya, Irwandi yang digeser dari dukungan tetua-GAM, justru membentuk partai lokal baru-yang berlatar warna orange. Di sinilah, pembabakan konflik horizontal dimulai. Suasana di arena sempat memanas, beberapa eks-kombatan (yang mendapat klaim-pengkhianat), dan pendatang pun sempat ikut menjadi korban. Namun, di sisi lain justru sangat menarik melihat kisruh di layar laptop, terutama arena media sosial maya seperti *facebook*.

Tahun 2008, *facebook* sebagai media sosial mulai merambah Indonesia, termasuk Aceh.[2] Meskipun, pengguna media *facebook* saat itu, masih dapat dihitung dengan jari. Namun, pengguna media *online* ini, bergerak cepat, bahkan melebihi sebuah "spekulasi" statistik. *Facebook* yang merupakan temuan budaya komunikasi paling pop di tahun 2000, telah mengalahkan *friendster* yang sempat

[1] Setidaknya, GAM berhasil meraih lebih dari 50% jabatan Kepala Daerah di wilayah Aceh, pada Pemilukada yang diselenggarakan pada 11 Desember 2006. Meskipun, saat itu GAM sendiri belum berhasil memobilisasi dirinya sebagai sebuah partai politik (Lihat Sindre, *Dari Perlawanan Bersenjata Menuju Partisipasi Politik; Transformasi Poiltik GAM,* dalam Törnquist,Olle,dkk (ed), *Aceh; Peran Perdamaian bagi Demokrasi dan Rekonstruksi.* PCD Press Indonesia, Yogyakarta. 2011, hal. 291-347). Lebih lanjut, Sindre mendeskripsikan, bahwa munculnya anggapan konvensional-GAM dari pengamat, yang meramal GAM sulit menang di Pemilu 2009 justru terpatahkan. Partai Aceh (baca; PA) bentukan GAM, berhasil memenangkan pesta demokrasi pada Pemilu 2009.

[2] *Facebook* adalah jejaring sosial, yang ditemukan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamar dan sesama mahasiswa Harvard, dan pertama sekali diluncurkan pada Februari 2004, (lihat di http://www. Id.wikipidedia.org/wiki/facebook.com)

populer di kalangan pengguna jasa komunikasi internet. Tahun 2010, dalam sebuah situs resmi yang dikeluarkan di salah satu web, menyebut pengguna facebook di Indonesia mencapai 21.195.800 orang. Angka ini, hampir mencapi 10 % dari penduduk Indonesia yang populasinya juga hampir mencapai 300 juta jiwa.

Pun demikian, *facebook* dapat dilihat bukan dari penampilan *style* dan pop-nya. Melainkan, fungsi utama jejaring sosial ini, sebagai media yang membangkitkan wacana kolektif. Sangat penting untuk dicatat, bahwa gerakan protes lewat media *online* ini, menunjukkan perkembangan dunia komunikasi di era globalisasi. Setidaknya, demikianlah yang dikatakan dalam buku *Sosiologi Perubahan Sosial,* bahwa jalan sejarah sudah berbeda, sejarah memiliki agen baru, mekanisme baru dan arah baru, dan ini tak dapat diabaikan oleh sejarawan.[3] Karena itu, semua kejadian historis menuntun semua sejarawan untuk mengkajinya dalam konteks global, tanpa mengisolasi posisi sejarah nasional dan regional. Kritik dan gerakan maya di jejaring sosial, setidaknya telah dibuktikan dalam beberapa kasus di Indonesia, salah satunya kepedulian pada seorang pasien bernama Prita-yang mendapat ketidakadilan dari rumah sakit tempat dia berobat.

Maka tak heran, dengan kondisi politik di Aceh yang belum sepenuhnya stabil pascakonflik, yang tergolong lama. Justru, protes paling "keras," sangat sering terjadi di *wall* (istilah dinding-halaman di *facebook*), ragam kutukan, makian menjadi suara-suara batin (instuisi) tak terbendung, bahkan tak jarang melewati pakem etika kritik. Protes hampir setiap hari terjadi, bahkan dalam hitungan detik sekalipun-status yang memuat unsur kritik terhadap dinamika politik di Aceh, terus ter-*update.*

Sebut saja, kasus lahirnya saingan partai politik lokal (akibat ter-fragmentasi), yang masih satu tubuh dalam kelompok eks-GAM sendiri. Suasana di *facebook* langsung "memanas." Beberapa akun yang ditengarai milik pengamat politik "pragmatis" (maya), terus mengeluarkan status kecamanan, hingga penghinaan terhadap arena sekaligus rivalitas politik tersebut. Tentu, masih banyak lagi proses dinamika politik di Aceh, yang tak terekam secara utuh lewat media massa lokal. Justru, ditemukan di media *online* ini. Budaya protes lewat *facebook,* menjadi kajian menarik tentunya, sejauh mana protes di *facebook* berimplikasi terhadap gerak ruang politik di Aceh.

Artikel singkat ini, mencoba menganalisis dan mendeskripsikan, bagaimana sebenarnya implikasi dari budaya protes di *facebook.* Terutama, dalam mengkonstruksi kesadaran berpolitik masyarakat (khususnya generasi muda pengguna jasa facebook) di Aceh. Di sisi lain, bagaimana fragmen-fragmen status serta refleksi visual, yang berasal dari intuisi atau justru yang terpikirkan oleh pelbagai ragam individu, bekerja (membantu) menegakkan benang demokrasi di tengah dinamika politik Aceh.

Facebook sebagai Arena

Sebagaimana telah didiskusikan pada pendahuluan, diskursus politik di media sosial *online* seperti *facebook,* cenderung sangat atau (bahkan) lebih ekspansif, dibanding arena sesungguhnya. Suasana ini, dapat dipahami karena internet bergerak selama 24 jam, tanpa mengenal tempat dan waktu. Jika dibanding diskusi-diskusi politik secara realitas, yang sering terjadi di warung-warung kopi di Aceh.

[3] Sztompka, Piotr, 2009. *Sosiologi Perubahan Sosial.* Prenada: Jakarta. Hlm. 103.

Tentu, diskusi politik di dunia maya lebih berani dan terbuka bagi semua kalangan.

Jika di ruang publik yang *real, space* untuk satu meja warung kopi, hanya dapat diisi oleh individu-individu, dan latar status tertentu. Maka, kondisi ini tak berlaku di "dinding" (sebutan untuk *wall*) *facebook.* Suara (teks-status) seorang pejabat pun, dapat dikomentari oleh seorang anak yang mungkin masih duduk di bangku sekolah SMP, atau seorang pedagang sayur di pasar. Artinya, ruang publik *facebook,* benar-benar meng-*input* semua protes dan kritik dalam meja persegi bernama *"wall."*

Pada prinsip dan subtansinya, *facebook* adalah sebuah garis batas yang memisahkan kehidupan nyata, dan imajinasi tanpa batas. Setiap individu yang ingin memiliki *facebook,* terlebih dahulu harus memiliki akun pribadi,[4] di mana hanya dirinya yang dapat membuka kamar privasi itu, melalu titik-titik kode *password* (kata kunci), dan hanya diketahui oleh dirinya. *Facebook* berbentuk sebuah halaman, di bagian paling atas-pojok kanan, terpampang foto dan nama identitas si pengguna. Pada seperempat kolom bagian kiri lembaran facebook, terdapat group-komunitas, di mana si pengguna akun ini menjadi membernya. Selanjutnya, seperempat kolom bagian kanan, terpampang beberapa pengumuman (seperti undangan), dan iklan-iklan gratis.

Di sebagian besar bagian tengah-bawah, hampir setengah halaman (luas) di lembaran *facebook,* berisi status dan komentar, dari pengguna akun media komunikasi ini, dan teus ter-*update* dalam hitungan detik. Karena itu, begitu pasword selesai dimasukkan, pengguna *facebook* pun ikut masuk dalam ruang imajinasi-yang mendorong intuisi dan nalar pikir untuk berkomentar, atau menciptakan status (istilah yang dipakai ketika menulis kalimat), yang selanjutnya akan dikomentari oleh akun-akun lain.

Sebagaimana diketahui, protes selalu muncul dari potret sosial, seperti ketidakadilan, yang disebabkan oleh posisi keadilan yang universal. Pada dasarnya, ketidakadilan cenderung dibiarkan begitu saja oleh anggota masyarakat nya. Meskipun, usaha menolak ketidakadilan juga sering ditolak oleh sebagian masyarakat yang peduli, hingga menjai gejala universal. Karena itu, isu ketiakadilan terus menjadi isu menarik dimunculkan oleh sebagian kelompok, yang melahirkan gerakan protes.[5]

Nuansa yang mengarah pada ketidakadilan, dalam proses demokrasi dan perpolitikan di Aceh, telah menyebabkan suara dan intuisi sebagian masyarakat, tertuang dengan liar dalam dialog-dialog di *facebook.* Usaha yang dilakukan, lewat penciptaan opini, berupa kalimat yang disebut status, setidaknya menjadi titik merubah cara berpikir orang-orang yang membacanya. Tak hanya itu, individu-individu yang melakukan aksi protes di media *facebook,* juga seolah (sedang) menunjukkan perasaan tanggung jawab pada masyarakatnya. Penting dicatat, sebagai makhluk sosial, manusia dan invididu selalu terkait dengan masyarakat, karena mereka hidup dalam ikatan sosial.[6]

Pelan tapi pasti, arena *facebook* seperti sebuah ruang untuk menyatukan kepingan diaspora, yang menyebar di mana-mana. Keberadaan orang Aceh di dalam negeri, lalu dipertemukan dengan orang Aceh di luar negeri. Atau, antarorang Aceh yang berlainan kabupaten/kota-saling bertukar informasi, kemudian membentuk

[4] Akun adalah istilah yang dipakai dalam dunia facebook, yang menunjukkan identitas pengguna facebook.

[5] Sujarwa, 2005. *Manusia dan Fenomena Budaya Menuju Perspektif Moralitas Agama.* Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan. Hlm. 75-79.

[6] *Ibid.,* hal, 111

satu perasaan yang sama, hingga melahirkan protes dan kritik terhadap sebuah situasi sosial. Kondisi ini, hampir serupa dengan apa yang pernah ditulis oleh Anderson (2008), dalam bukunya *Imagined Communities; Komunitas-komunitas Terbayang,* saat itu bahasa cetak lah yang menjadi "Asal muasal kesadaran Nasional." Sekali lagi, wacana lewat media cetak, telah menyatukan-mengkonstruksi kesadaran kolektif negara bangsa Indonesia saat itu, untuk protes menuntut kemerdekaan, dari ketidakadilan kolonialisme.[7]

Transformasi atmosfer politik yang terjadi di Aceh, kian memberanikan individu-individu tertentu, untuk mengkritik ketidakbenaran dan ketimpangan hukum. Menariknya, kritik juga berlaku terhadap mantan-mantan kombatan yang dulu sangat disegani masa konflik. Keberanian ini, tentu disebabkan oleh perasaan bertanggung jawab, kekritisan berpikir, hingga melihat akun-akun sesama yang "terlampau" berani pula. Meskipun, banyak protes dan kritik, lahir dari akun palsu yang dibuat, hingga orang lain yang membaca status, tak mengetahui identitas asli si empunya profil *facebook* tersebut.

Karena itu, *facebook* telah menjadi arena, bagaimana diskursus, gejolak emosi, dialog, hingga protes dimainkan dan diperankan oleh individu-individu "bisu," yang tak dapat diraba, namun dapat dirasakan kehadirannya. Di sini, sebuah permainan dan pertarungan ide, gengsi hingga akar pengetahuan sosial-politik, sering dipertaruhkan. Berbalas argumen dan kritik, sudah menjadi wajah *facebook*, terutama dalam menyoroti kasus dinamika politik di Aceh pasca perdamaian.

Wacana diproduksi dari Status

Wacana selalu muncul dari kerangka aksi kolektif. Gamson (1992), mendefenisikan pemaknaan pada kerangka kolektif, yang merupakan seperangkat keyakinan dan pemaknaan yang berorientasi pada tindakan, hingga memberi inspirasi dan melegitimasi berbagai kegiatan dan kampanye gerakan sosial.[8] Lebih lanjut, Gamson menekankan, bahwa wacana dalam media, adalah sumber informasi penting, yang dapat diambil oleh manusia lain, ketika mereka mencoba mencari penjelasan atas isu-isu yang mereka bicarakan.

Kalimat *facebook* (baca; status) yang berbau politik, lazim menyandingkan dan mempertemukan antara isu dan realitas di Aceh, ikut melahirkan kerangka kolektif (dibaca oleh banyak manusia). Adakalanya, wacana lahir dari sebuah status yang menyoroti ketimpangan demokrasi di Aceh. Misalnya, status yang berbunyi "*Di Laot sapeu pakat, Troh u darat ka laen keunira*" (semasa di laut sependapat, begitu tiba di darat, semua berbeda). Status ini, bermakna sindiran pada *elite* politik yang dianggap telah mengorbankan rakyat, yang dahulunya mendukung *elite* dalam memperoleh kursi kekuasaan.

Beberapa status lain, yang tergolong berbau provokasi (wacana) ikut bermunculan, seperti akun yang dilimiliki oleh profil absurd (karena tidak jelas identitas), menulis *"Sudah lima tahun diberikan otsus, tapi negeri kita belum maju juga,"-"kita pilih orang lain salah, memilih orang sendiri (orang Aceh) lebih salah."* Biasanya, setelah status sebagai wacana itu diorbitkan oleh akun-akun pro pada kritik, puluhan hingga ratusan komentar dari akun lain pun akan bermunculan, seakan ikut mendukung.

[7]Baca Anderson, Benedict. 2008. *Imagined Communities; Komunitas-komunitas Terbayang.* Yogyakarta: Insist.

[8]Klandermans, Bert, 2005. *Protes dalam Kajian Psikologi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 7.

Begitulah seterusnya, sebuah status akan mempengaruhi pikiran pembacanya membentuk wacana publik.

Contoh bentuk status di *wall facebook*,

> Pemilik akun (berinisial H)-status "Virus revolusi mulai meluas ke seluruh Aceh. Partai-partai peserta pemilu mulai memahami peradaban dan bagaimana menjadi manusia politik bukan "hewan politik," yang merebut kekuasaan dengan cara yang tidak manusiawi dan jauh dari nilai-nilai peradaban." Setelah itu, muncul ragam komentar, seperti komentar (akun CD) "semoga berhasil, kita harus lakukan revolusi sosial bila perlu. Parlemen jalanan sepertinya harus berperan kembali"-lalu dijawab lagi oleh akun H "Amiin...doa anda sangat berarti," dan seterusnya.
>
> Pemilik akun (TZ)-status "Setelah dubes Amerika kembali datangi KPK, menjadi menarik menunggu drama apa yang bakal kembali terjadi di negeri ini pada beberapa waktu ke depan." Kemudian, muncul komentar dari akun (ZK) "mungkin belajar berantas korupsi," (MU) "TZ anda itu, terlalu banyak curiga sama orang," dilanjutkan oleh (TZ) "MU anda ini, pura-pura terlalu baik," dan seterusnya komentar-komenter terus bermunculan. Begitulah facebook memproduksi wacana sosial.

Wacana publik, selalu akan melibatkan keberadaan suatu proses saling mempengaruhi (*interplay*) antara wacana publik, dan interaksi pribadi. Pertemuan dan percakapan sehari-hari dalam ruang *facebook*, akan terus mengindetifikasi individu pengguna jaringan sosial *online* ini. Produksi wacana, lewat media (termasuk *facebook*), suka atau tidak, akan terus menggiring pelaku sosial untuk mempercayai wacana berita (status) yang muncul. Karena itu, meskipun di luar ambiguitasnya, wacana berita selalu penting bagi pelaku konflik mana pun, sehingga penting bagi siapapun untuk dapat mempengaruhi wacana semacam ini.[9] Pelaku konflik, dalam hal ini, seperti status provokatif-yang bisa memunculkan ide-ide melahirkan gerakan sosial nyata kemudian hari.

Apalagi, watak dan karakter orang Aceh yang keras dan fanatik, sebagaimana dideskripsikan oleh Zentgraaff (1983),[10] seakan ter-ejawantahkan dalam status-status di *facebook*. Bahasa yang berkonotasi mengecam, sering sekali muncul dalam kalimat yang kadang dicampur dengan polesan bahasa Aceh. Saat orang (Aceh) membacanya, langsung bereaksi, seperti ikut membenarkan poin yang disampaikan oleh penyampai status, atau memberi komentar ikut mengecam persoalan yang sedang didialogkan.

Wacana yang membentuk kerangka aksi kolektif, tentunya bukan sembarang keyakinan kolektif. Kerangka ini, dibentuk berkaitan dengan konflik-konflik di dalam masyarakat. Karenanya, perdebatan isu-isu kontroversial terkait atmosfer politik di Aceh, terus diperdebatkan dalam ranah facebook. Selain menarik, juga psikologi penggunan

---

[9] *Ibid.*, hal, 66-69

[10] Zentgraaff menulis dengan kesan-dampak penuh heroik diri orang Aceh, seperti yang diceritakannya, di mana segerombolan pasukan Belanda dibantu Marsose saat melakukan pengepungan dalam sebuah kampung, justru seorang laki-laki Aceh menyerang pasukan yang ramai itu, dengan kelewang (parang) nya. Tatkala dia rubuh, akibat rentetan peluru pasukan Belanda, istrinya yang pemberani pun ikut menyerang kompeni dengan kelewang yang jatuh dari tangan suaminya, lihat Zentgraaff, 1983. *Aceh.* Jakarta: Depdikbud. Hlm. 120-121.

akun yang ingin status-wacananya dihargai oleh orang banyak.

Maka, tak mengherankan, jika membuka media *facebook*, secara spontan akan muncul ribuan status berbentuk wacana, yang mengarah pada protes. Tak hanya itu, di sini juga terpampang group yang berisi akun-akun terseleksi, yang ikut memproduksi wacana politik di Aceh. Di dalam group, biasanya diskusi lebih terfokus, karena hanya merekrut akun-akun yang dinilai layak oleh pembuat group tersebut. Tak semua akun, diperbolehkan bergabung dalam group, hanya akun yang telah memperoleh legalisasi dari beberapa pemilik groub (baca : admin), yang dapat mengikuti perkembangan wacana dalam komunitas maya itu.

Wacana politik di *facebook*, ikut dipakai sebagai alat meneropong arah perkembangan politik di Aceh, oleh pengguna jasa jejaring sosial ini. Dapat dibayangkan, dalam sehari, bisa muncul puluhan wacana yang mendeskripsikan sebuah kejanggalan dalam arena politik. Ketidakseriusan pemerintah daerah, demonstrasi menuntut pemekaran, kisruh Wali Nanggroe-Aceh, hingga anggaran publik yang salah digunakan, menjadi wacana yang diproduksi tanpa batasan waktu. Namun, wacana-wacana yang seharusnya krusial-lahir di *facebook*, juga sering ikut cepat terlupakan, seiring munculnya wacana baru dalam hitungan detik. Apalagi, wacana di *facebook* sering bersifat verbal, tanpa aksi penyelesaian di lapangan.

Facebook dan Ruang Kesadaran

Bahasa sekaligus simbol dan objek dari penginderaan, yang dilihat oleh manusia, benar-benar telah menggugah kesadaran manusia. Setidaknya, kalimat ini sepadan dengan yang dideskripsikan oleh Cassirer, mengenai kesadaran manusia. Menurutnya, ingatan simbolis (dalam hal ini status *facebook*), merupakan sebuah proses manusia mengulang pengalaman, sekaligus menyusun kembali pengalaman itu.[11] Apalagi, menurut Koentjaraningrat, bahasa yang merupakan simbol utama penggugah kesadaran manusia adalah salah satu unsur kebudayaan, yang membentuk budaya itu sendiri. [12]

Bahasa protes dan kritik, yang setiap hari dimunculkan, terus menggiring orang yang membaca dan menikmatinya-membangun sebuah ruang kesadaran, yang seakan ikut tertindas. Beberapa kasus di Aceh, terkait janji pemilukada gubernur dan wakil gubernur, kini terus menuai kritik di media *facebook*. Bahkan, muncul gerakan sosial mengampanyekan protes lewat tulisan di baju-baju kaos, yang menuntut realisasi janji-janji tersebut, yang semua bermula dari *facebook*.[13] Media *facebook*, sebagai ruang kesadaran kolektif, dibentuk dengan kebutuhan dan kesadaran kolektif pula.[14] Sebagaimana dikatakan oleh Melucci (1989), penciptaan identitas kolektif adalah salah satu dari tantangan fundamental yang akan dihadapi oleh para partisipan gerakan. Karena itu, tak mengherankan jika perasaan kolektif-sama-sama sedang berjuang (kaum *facebook-er*), menjadi pondasi (protes) yang dituangkan setiap hari lewat wacana politik, untuk melahirkan ruang kesadaran yang semakin mendalam.

---

[11] Cassirer, Ernst, 1987. *Manusia dan Kebudayaan; Sebuah Esei Tentang Manusia.* Jakarta: Gramedia. Hlm. 3-78.

[12] Koentjaraningrat, 1981. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 202-209.

[13] Saya punya beberapa foto, dokumentasi sebagai data visual mengenai baju-baju yang diwujudkan dalam aksi gerakan sosial, menuntut janji-janji gubernur terpilih pada Pemilukada tahun 2012. Namun, dengan beberapa pertimbangan, foto itu tak bisa ditampilkan dalam artikel singkat ini.

[14] Klandermans, Bert, *Protes...*,hal. 53

Pun demikian, *facebook* yang merupakan kumpulan suara individu, mewakili masyarakat urban-modern, menunjukkan gejala budaya yang memunculkan sikap hidup baru. Menurut Edward Shill (1981), bahwa masyarakat adalah fenomena antarwaktu. Masyarakat terjelma bukan karena keberadaannya di satu saat dalam perjalanan waktu. Tetapi, ia hanya ada melalui waktu, ia adalah jelmaan waktu. Lebih jauh, masyarakat selalu berhubungan erat antara fase sebelumnya, dengan masa kini, yang menjadi sebab akibat penentuan fase berikutnya.

Maka, mekanisme ideal (psikologi) masyarakat, selalu bekerja melalui kemampuan mengingat dan berkomunikasi. Konflik dan tsunami seperti sebuah jembatan lampau dan sekarang di Aceh, selalu menjadi landasan sekaligus alasan protes lahir. Keheroikan histori, janji-janji, dan simbol-simbol yang dimunculkan selama konflik, dipandang berbanding terbalik dengan kondisi pascadamai, oleh individu yang melakukan protes. Karena itu, kontradiksi era lah, yang terus melahirkan suara-suara kritik kian liar.

Giddens (1979) sendiri, menyebut tulisan menjadi temuan dasar (simbol), yang terus ikut memperluas cakupan interaksi, baik menurut ruang maupun waktu.[15] Status di *facebook*, yang merupakan kalimat-kalimat singkat, berkonotasi protes tentu akan mempengaruhi banyak pembaca lain. Kerangka berpikir kemungkinan ikut terejawantahkan dalam kondisi nyata, sebagaimana gerakan protes janji kampanye gubernur Aceh, yang kemudian diwujudkan lewat mencetak ratusan baju kaos bertuliskan janji-janji masa kampanye itu.

Akhirnya, memang tidak semua protes yang muncul di media sosial *facebook*, akan menjadi gerakan sosial (mebangun kesadaran massa), secara realitas-sebanyak wacana dan kesadaran yang disebarkan lewat wacana status. Namun *facebook*, sebagai sebuah bentuk komunikasi kebudayaan baru, setidaknya telah menjadi ruang protes paling efektif-sekedar pelampiasan intuisi "liar"-akibat kegelisahan kolektif, melihat lingkungan politik yang dinilai semakin carut marut.

---

[15] Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan*, hal. 65-67

Muhajir Al Fairusy, S.Hum, M.A. adalah Pengurus MAA Aceh dan Peneliti Antropologi Budaya-Aceh

ASAL MULA PAYA DAPUR
(Cerita rakyat dari Kluet, Kabupaten Aceh Selatan)

Cerita ini mengisahkan tentang asal mula Paya Dapur yang ada di Aceh Selatan. Berawal dari kisah kehidupan sepasang suami istri yang hidup rukun dan damai ditepi sebuah Payau. Suatu hari keharmonisan rumah tangga mereka terusik dengan ulah istrinya yang tidak bisa menjaga amanahnya, sehingga kehancuran pun terjadi. Suaminya marah besar dan pergi meninggalkannya. Dari hasil perbuatannya Si istri tersebut menuai hasilnya yaitu lahir seorang anak yang tidak diinginkannya, sehingga bayi tersebut dibuang ke dalam payau, bersamaan dengan itu terjadilah suatu kejadian yang aneh, tiba-tiba langit menjadi gelap dan hujan turun dengan lebatnya sehingga menggenangi perkampungan penduduk yang menelan banyak korban jiwa. Kejadian itu meninggalkan sesuatu hal yang sangat luar biasa, dari dasar payau tersebut keluar asap mengepul yang tiada hentinya. Banyak orang berniat hendak mendekati payau tersebut, namun ketika tiba di tempat itu, maka perahu terbalik dan tidak muncul-muncul lagi. Tidak ada seorangpun yang dapat mencapai tempat tersebut. Konon ditempat tersebut sering muncul sosok orang tua yang menurut masyarakat setempat adalah seorang pertapa yang baik hati, yang menjaga kesucian tempat tersebut. Sehingga tidak ada lagi orang yang berbuat mesum ditempat itu. Penduduk setempat menganggap tempat itu sebagai tempat keramat dan setiap tahunnya mereka membuat sesaji untuk orang yang dianggap sakti tersebut. Saat ini asap yang ada dipayau tersebut menghilang, dan penduduk tidak berani lagi datang kepayau tersebut karena dianggap angker. Akhirnya penduduk sekitar payau tersebut menamakan kampungnya dengan sebutan Payau Dapur.

Di tepi sebuah payo yang meblang, tadingmo sepasang tuan anak yang ngeluh rukun ngon dameui. Di payo nari idi kak idi kenan ikan, selanjutno didayokan kak idi bo pekan dan kepengno ditukorkan keperluan seharian. Di npayo idi mebuei kak ngkawei ikan karno genop ngkawei jadih ndakpenah ndak kenan. Sehinggo ubi anak laki mbuei ngabiskon nwaktuno kawei di payo idi.

Wari sado kak anak laki setengah umur nyumpoi ukuman nelayan yang merumoh di tepi payo idi sesado di rumah. Memang rumohno nggou selalu naydi bekas piyuh bagi kak-kak dyang laus ngkawei bo bekas idi.

Anak baru ngudo idi ndak mengijinkan anak laki idi arok kano nangkih bo rumoh. Mako terjadimo yang ndak diarok'i. Anak beru mudo idi hamil naklot dibetoh lakino yang ndakngo ulak ndak cari ikan. Anak beru idi nyadi melo rue rumah nggoupei nengkoh kabar tersir bahwo io hamil dengon kak lain yang oyak lakino. Ntukno lakino cari ikan didapoti ukumano bagas kaedaan sedih hatei. Nggoupei lakino meteno soal yang menimpo ukumo, sehinggo begidi lakino terkejud kelok nekohso. Karno kesetiaanno nggou tercemar kak lain. Io haramkon nyentuh ukumanno dan ngopeidiio pei laus nadingkon ukmanno sesado rumah di tepi payo yang meblang idi.Dan ndak akon pernah ulak nangeh. Io laus dengon kecewa yang magas. Sementaro isi kandungan anak beru ngudo idi rahe. Karno lahe anak idino ndak di arok ino, mako dicamkkonno bodipayo idi ngeluh-ngeluh.

Kelom roh dengin tibo-tibo datas payo idi turun udan lebat kelok dan lawe meblun pei roh ngerendam kamoungidi. Rumoh tepi payo idi lenong rit anak beru yang tadingkon lakino. Musibah yang roh tibo-tibo dan mangan korban idi, erupukon

azab bagi anak beru ngon anak laki setengah umur yang meseum waridi.nggou pepigo wari lawe ngerendom kampumh penduduk, lawe mulai surut hinggo bagei semulo. Tapi rumah di tepi payo yang menjadi bekas tading anak baru malkang idi nggou nadak membekas nangeh. Natlat nangeh ciri-ciri ngeluh di jadih. Brang kali nango jadih panganan ikan ngo binatang lawe laino sewaktu lenong dimbah lawe meblun.

Tapi sesuatu yang luar biaso terjadi di tengah payo idi, lot cimbor mekepung ndakpiyus di bagas lawe nari. Kak krian jadi metano-tano kedei yang terjadi. Kak pulo nenohi bekas aneh idi, taeimwakti sekei tuk bo idi bungki kak idi karom dan ndak berbuat nangeh. Begidi selanjutno, ndak lot yang dapot tuk bo bekas idi. Sementaro cimbor idi tetop mecipoi sementas-mentas wari ndak piyuh. Tekadang yang lebih aneh dan lot kak metuo yang cendor diantaro cimbor idi dengon tenang dan nyelongi nauh bo nadop. Kak mempecayoi sebagei ka yang sakti nggou roh bo bekas idi.

Tapi kak yang bagas bijak sano bagas hal gaib nggou menipibahwo yang ngisi bekas idi lamo sado kak betapo yang besei hatei nyagoi kesucian bekas idi dan memang sejak lot no cimboridi nalot langeh yang mero ndak senonoh ditepi payo. Tambah dan laweno meucihuo bagai ari laut.penduduk sekitarno ngganggab idi keramat dan setiap tahunno penduduk nyediakon sesajen untuk yang dianggap sakti dibagas payo.

Begidimo berlanjut legat tuk puluhan tahun. Payo idi tetop ngerueikon cimbor, mebagai pendapot rue, lot yang ncrokkon idi latmo kerajaan urangbunian dan lot kano kak ncrokkon pertapoan sado kak yang sakti. Tapi bagas reko-reko penduduk idi beunei nggou dibetohi bahwa hyang mengisi bekas idi latmo jemo suci yang nyagaoi payo supayo nalot nangeh yang ngumohi. Karno payo meblang idi merupokon aseino ngeluh bagi penduduk sekitarno. Ndak nekah nggou penduduk betohan. Kak ndak segan-segan nangeh ngelakukon keino arokno di jadih, walaupai kadang-kadang keno penyakit. Nekah-nekah cimbor idipei beunei. Nggou beunei cimboe idi kak semakin ndak mero nangeh roh bekas idi, karno ngati keno musibah. Nggoupeidi bekas idi nyadi paling angker. Penduduk disekitarno ngereikon kampungno dengon Payah Dapur. Berdasar pado nipi sado kak ahli nujum untuk menghindari kejadian-kejadian gaib yang ndak di pido.

Disadur dari : Cerita Rakyat Nanggroe Aceh Darusssalam. (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), hlm. 140.

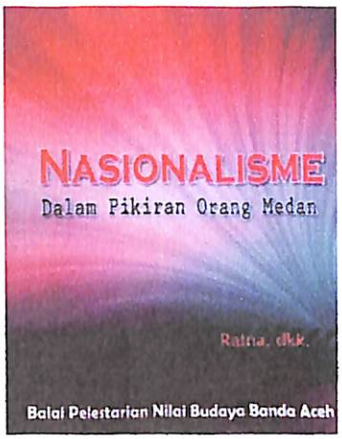

TERBITAN

Dari
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BANDA ACEH

Ratna dkk., *Nasionalisme Dalam Pikiran Orang Medan,* Banda Aceh: BPNB Banda Aceh, 2012, v + 145 hlm.

Ibarat organisme yang terus tumbuh, nasionalisme dan segala hal yang berkaitan dengan istilah ini tidak pernah henti diperbincangkan bahkan diperdebatkan. Istilah yang berhubungan erat dengan gagasan dan asal-usul pembentukan negara ini, memiliki sejarah yang panjang dengan tafsir yang beragam. Di berbagai negara, gagasan nasional ini sering disandingkan dengan gagasan (terutama politik) lain untuk mengukuhkan sesuatu secara simbolik untuk dijadikan pengikat perasaan kolektif. Tafsir serta perubahan dan kesinambungan tafsir mengenai nasionalisme inilah yang dibahas buku *Nasionalisme dalam Pikiran Orang Medan.*

Buku yang ditulis Ratna dan kawan-kawan ini memberi tekanan pada bagaimana warga kota Medan memahami, menafsirkan, memandang dan menempatkan perasaan nasional yang sesungguhnya abstrak dalam ruang hidupnya. Hasilnya cukup menarik, apalagi penelitian dengan pendekatan sejarah kuantitatif ini dapat menghimpun ragam persepsi dari empatpuluhan informan dari berbagai tingkat usia, pekerjaan, pendidikan dan jender. Beberapa persepsi dan ulasan memang masih menunjukkan kesinambungan tafsir nasionalisme Indonesia sebagaimana yang pernah diajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB) dari para 'informan senior'. Namun persepsi informan usia muda cukup membuat pembaca berpikir ulang. Bagi anak-anak muda ini, nasionalisme tidak lagi berhubungan dengan gagasan tentang negara atau dianggap sebagai pengikat lagi tetapi sudah dianggap sebagai perasaan, norma sekaligus nilai moral yang mengikat orang Indonesia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Persepsi yang dihimpun ini menunjukkan bahwa tafsir nasionalisme anak muda ini tidak lagi didasarkan pada kenangan melainkan pada nalar dan pengamatan mereka atas situasi terkini. Penulis buku ini berhasil menghimpun tafsir nasionalisme dengan nuansa kekecewaan anak-anak muda pada penyelenggara negara.

Buku yang diterbitkan BPNB Banda Aceh ini merupakan usaha pemanfaatan nilai sejarah untuk keperluan yang bisa digunakan dalam pendidikan dan pengajaran. Meskipun para penulis sadar bahwa konstruksi nasiolisme yang abstrak itu tidak dapat dimanfaat secara praktis tetapi pembahasan dalam buku ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana orang Medan yang secara historis terbentuk karena kombinasi sosial yang unik kolonialisme dan kapitalisme, berubah dan sinambung dari masa lalu sampai kini..